

# RENCANA STRATEGIS

## TAHUN 2021-2026



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dapat disusun sesuai ketentuan yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yaitu, *“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera”*.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Sekretariat Daerah terdiri dari 8 bab.

Selanjutnya, melalui pengantar ini kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak guna penyempurnaan perubahan Rencana Strategis ini. Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta partisipasi dalam penyusunan perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini, semoga sumbangsih ini bermanfaat bagi kemajuan dan



perkembangan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya di masa yang akan datang pada khususnya sesuai visi dan misi daerah.

Singaparna,

2021

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya



Dr. H. MOHAMAD ZEN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680608 199412 1 003



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Landasan Hukum .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>12</b>
1.3.1 Maksud.....	12
1.3.2 Tujuan.....	12
<b>1.4 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.....</b>	<b>16</b>
<b>2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah .....</b>	<b>23</b>
2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia.....	23
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana.....	25
<b>2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .....</b>	<b>27</b>
<b>2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH.....</b>	<b>72</b>
<b>3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.....</b>	<b>72</b>





<b>3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....</b>	<b>75</b>
3.2.1 Visi .....	75
3.2.2 Misi .....	83
3.2.3 Tujuan Dan Sasaran.....	86
<b>3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat .....</b>	<b>95</b>
<b>3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031.....</b>	<b>100</b>
<b>3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....</b>	<b>105</b>
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>109</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>114</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>117</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>139</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>141</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin, 2021</i> -----	23
Tabel 2.2	<i>Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menurut Unit Kerja dan Jenjang Pendidikan, 2021</i> -----	24
Tabel 2.3	<i>Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menurut Unit Kerja dan Golongan, 2021</i> -----	25
Tabel 2.4	<i>Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2021</i> -----	26
Tabel 2.5	<i>Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2016-2020</i> -----	30
Tabel 2.6	<i>Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2016-2020</i> -----	37
Tabel 2.7	<i>Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2016-2021</i> -----	69
Tabel 2.8	<i>Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2016-2021</i> -----	70
Tabel 3.1	<i>Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2016-2021</i> -----	74
Tabel 3.2	<i>Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021</i> -----	80
Tabel 3.3	<i>Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021</i> -----	84
Tabel 3.4	<i>Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021</i> -----	88
Tabel 3.5	<i>Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2016-2021</i> -----	92
Tabel 3.6	<i>Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019</i> -----	96
Tabel 3.7	<i>Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan yang Tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang Menjadi Pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat</i> -----	99
Tabel 3.8	<i>Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031</i> -----	101
Tabel 3.9	<i>Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031</i> -----	104
Tabel 4.1	<i>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021</i>	



	-----	11
	2	
<i>Tabel 5.1</i>	<i>Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021</i>	
	-----	11
	6	
<i>Tabel 6.1</i>	<i>Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021</i>	
	-----	12
	8	
<i>Tabel 7.1</i>	<i>Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021</i>	
	-----	13
	9	



## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1</i>	<i>Proses Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021</i> -----	4
<i>Gambar 1.2</i>	<i>Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021</i> -----	5
<i>Gambar 1.3</i>	<i>Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021</i> -----	6
<i>Gambar 2.1</i>	<i>Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya</i> -----	24



# BAB I PENDAHULUAN

*Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis*

## 1.1 Pendahuluan

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan ekonomis, atau dengan kata lain untuk mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus menyikapi hal tersebut dengan sungguh-sungguh agar penyediaan layanan yang diterima masyarakat dapat diberikan secara optimal sesuai dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan Perangkat Daerah penanggungjawab koordinasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen pemerintahan daerah yang baik tersebut sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan



program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, selanjutnya setiap perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

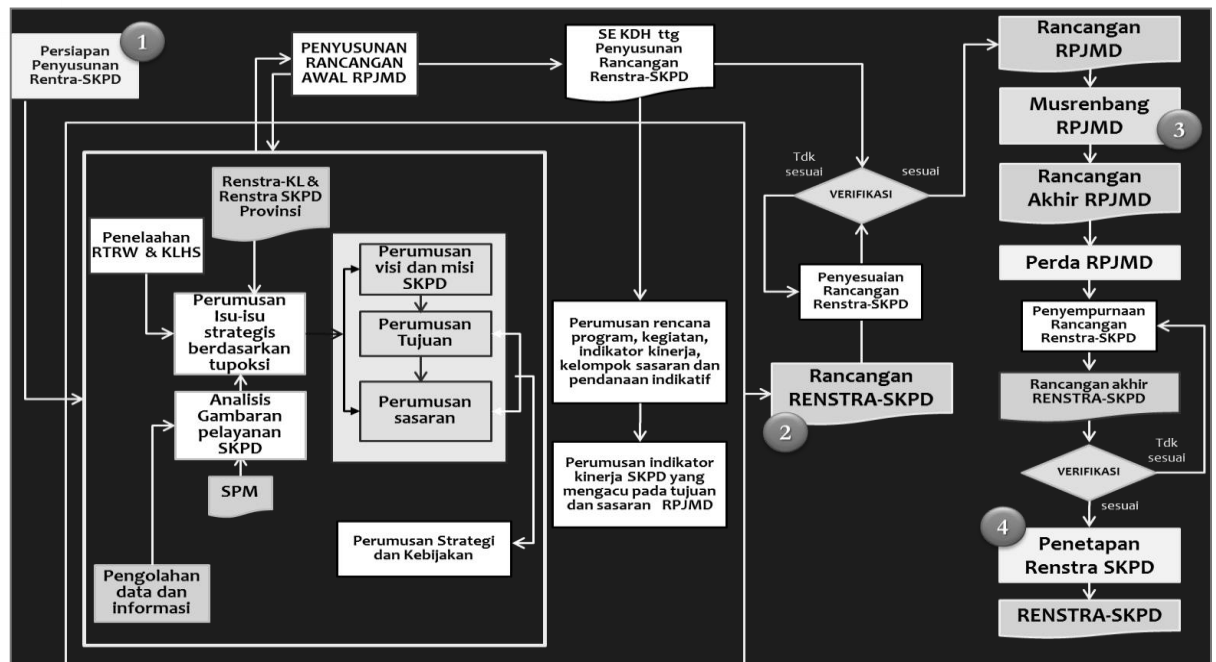
Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Sekretaris Daerah selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Model Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Gambar 1.1.



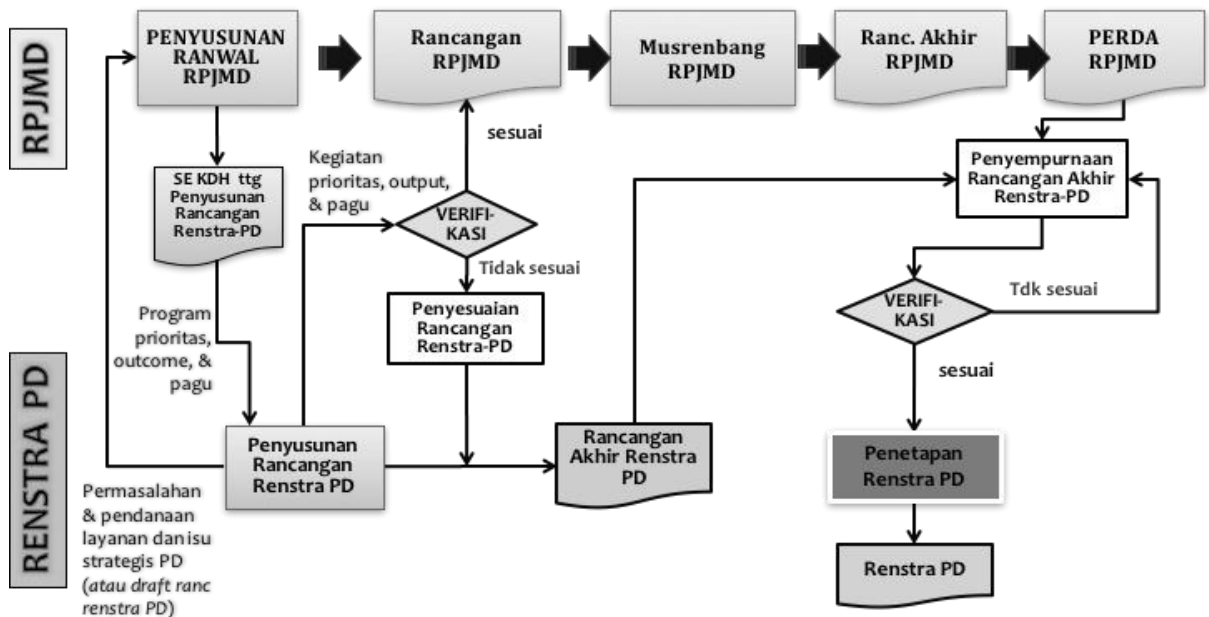
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Sumber: Kemendagri, 2017

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rencana strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah dimana nantinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan koordinator penyusunan rencana strategis



perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan pada Gambar 1.2.

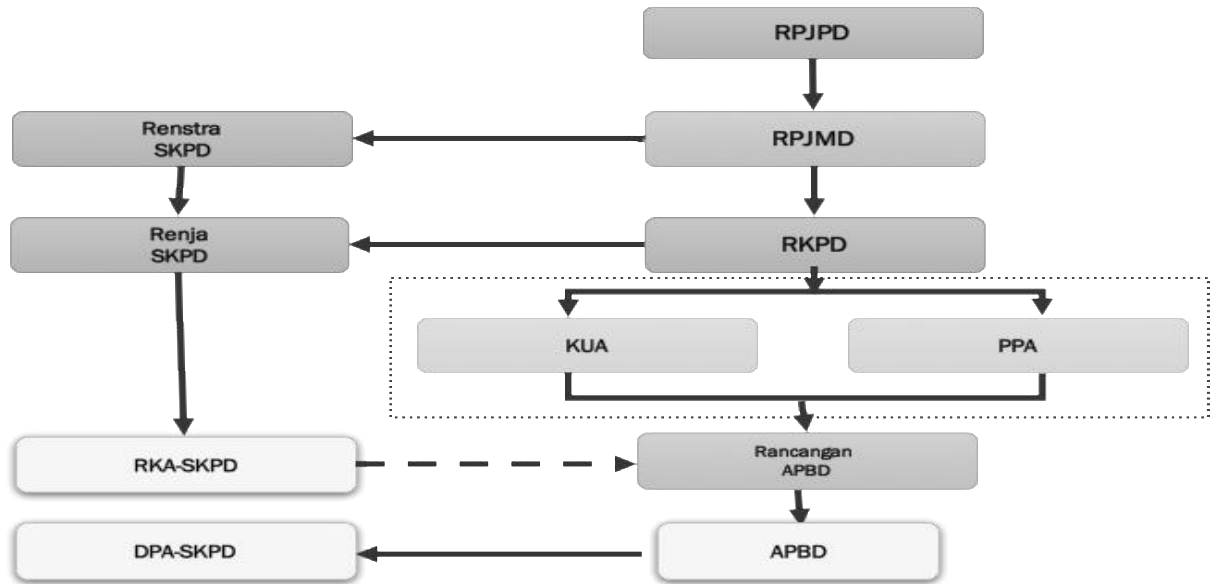


Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Sumber: Kemendagri, 2017

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,

kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis ditampilkan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Sumber: Kemendagri, 2017

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata



Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran



Daerah Nomor 45);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



40. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
41. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang menjamin suatu keterkaitan dan sinergi dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh tiap Asisten dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu *“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/ Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera.”*

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan





pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Sekretariat Daerah;

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Asisten dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**



Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya Sekretariat Daerah baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKATDAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

#### BAB VIII PENUTUP



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

*Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya Sekretariat Daerah baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah*

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah**

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan Pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Adapun fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara



- pada instansi daerah;
- e. perumusan kebijakan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan;
  - f. pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan;
  - h. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya di atas Sekretariat Daerah membangun kesisteman organisasi perangkat daerah, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, beriman, dan bertaqwa, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, mewujudkan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan.

Secara rinci, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tertuang dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah. Sebagai sebuah perangkat daerah yang termasuk dalam Tipe A, susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
  1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:
    - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan;
    - b) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah; dan
    - c) Subbagian Pertanahan;
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
    - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;



- b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
- c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat;
- 3. Bagian Hukum, terdiri atas:
  - a) Subbagian Perundang-Undangan;
  - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
  - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
  - 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
    - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
    - b) Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
    - c) Subbagian Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan Program;
  - 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
    - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
    - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
  - 1. Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan terdiri atas:
    - a) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
    - b) Subbagian Kearsipan; dan
    - c) Subbagian Perpustakaan;
  - 2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
    - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
    - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
  - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:



- a) Subbagian Protokol;
  - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
  - c) Subbagian Dokumentasi;
4. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
- a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b) Subbagian Keuangan; dan
  - c) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- e. Staf Ahli Bupati; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian rinci mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal menyusun dan mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Staf Ahli Bupati dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, lembaga lain, dan Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c) Penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat Daerah; dan



d) Penyelenggaraan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
- b. Menyelenggarakan penyusunan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- c. Menyelenggarakan pengendalian, pemantauan dan pembinaan kinerja Perangkat Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- d. Menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administratif Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan serta administrasi umum;
- g. Menyelenggarakan pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah;
- h. Menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
- i. Menyelenggarakan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengembangan hukum, organisasi dan tata laksana Perangkat Daerah;
- j. Menyelenggarakan pembinaan kesadaran hukum dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah;





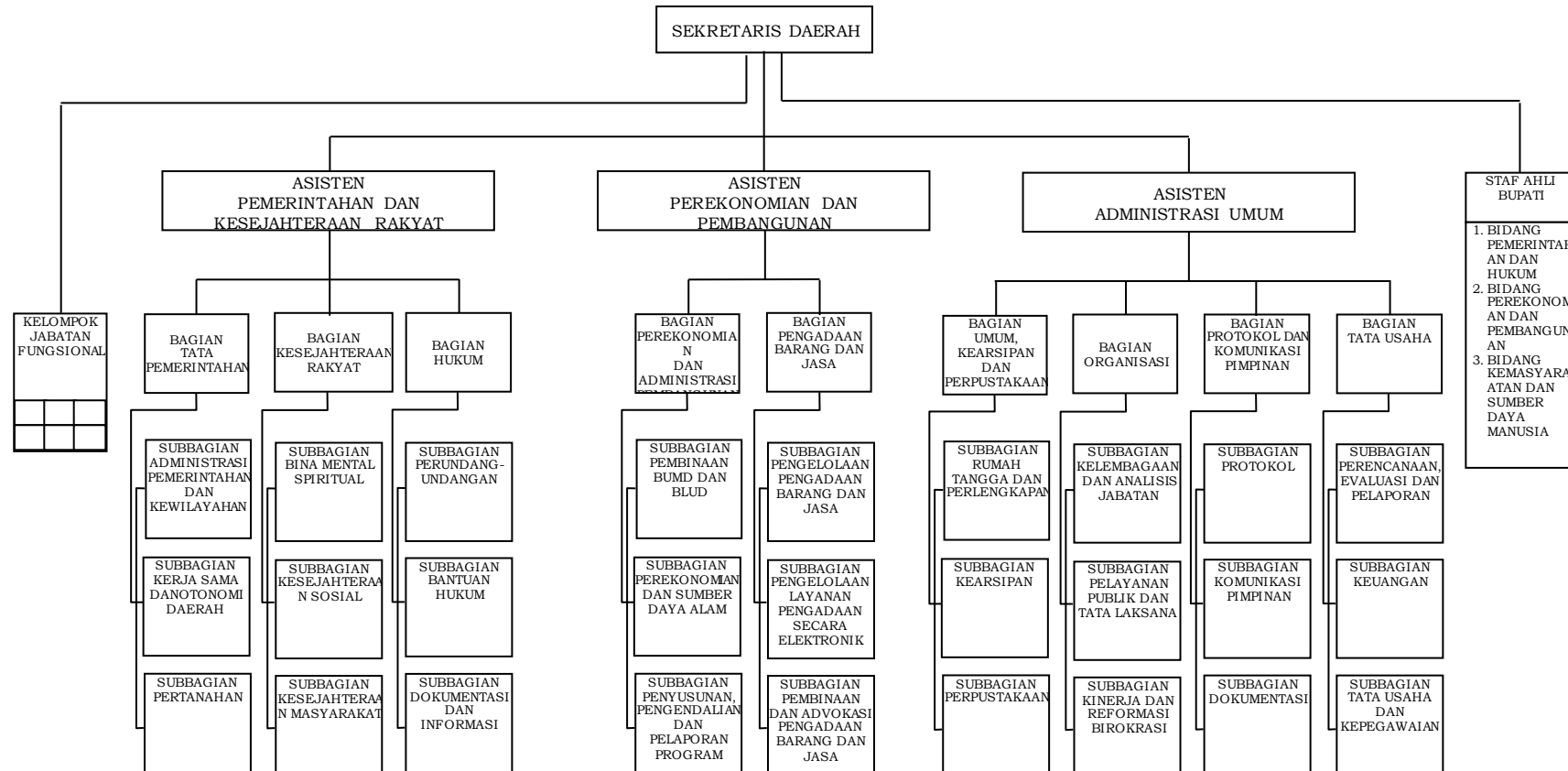
- k. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pembinaan pelaksanaan hubungan dan/atau kerja sama pembangunan antar Daerah, antar Daerah dengan Pemerintah, antar Daerah dengan lembaga lainnya;
- l. Menyelenggarakan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
- m. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan hubungan kerja internal Sekretariat Daerah dan antar Perangkat Daerah, satuan kerja fungsional pelaksanaan di Daerah, Badan Usaha Milik Daerah serta lembaga lainnya di Daerah;
- o. Menyelenggarakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan;
- p. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi vertikal/ lembaga lain yang ada di Daerah; dan
- q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. Asisten Administrasi Umum.



STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya



## 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

### 2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumberdaya manusia secara optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi. Berdasarkan pada kondisi sumber daya manusia per Nopember 2021, jumlah pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin, 2021

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretaris Daerah	1		1
2	Asisten	3		3
3	Staf Ahli Bupati	1		1
4	Bagian Pemerintahan	7	3	10
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	15	3	18
6	Bagian Prokompim	20	15	35
7	Bagian BPBJ/Barjas	12	2	14
8	Bagian Ekbang	9	5	14
9	Bagian Organisasi	5	6	11
10	Bagian Umum	21	4	25
11	Bagian Hukum	10	7	17
12	Bagian Tata Usaha	16	13	29
Jumlah Total		120	58	178

Sumber : DUK Setda 2021

Keterangan: Kondisi per Desember 2021



Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 orang Asisten, 1 orang Staf Ahli, 9 orang Kepala Bagian, 25 orang Kepala Sub Bagian dan 139 orang Pejabat fungsional umum. Unit kerja yang paling banyak memiliki pegawai di Sekretariat Daerah adalah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan jumlah sebanyak 35 pegawai. Dilihat berdasarkan jenis kelamin pada Tabel 2.1, jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 120 orang (67,42%), sedang jumlah pegawai perempuan sebanyak 58 orang (32,58%).

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menurut Unit Kerja dan Jenjang Pendidikan, 2021

No	Unit Kerja	Jumlah	Tingkat Pendidikan								
			S3	S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD
1	Sekretaris Daerah	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Asisten	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
3	Staf Ahli Bupati	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Bagian Pemerintahan	10	-	2	8	-	-	-	-	-	-
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	18	-	-	15	-	-	-	3	-	-
6	Bagian Prokompim	35	-	2	22	2	1	-	8	-	-
7	Bagian BPBJ/Barjas	14	-	-	12	-	2	-	-	-	-
8	Bagian Ekbang	14	-	4	8	-	-	-	2	-	-
9	Bagian Organisasi	11	-	1	8	1	-	-	1	-	-
10	Bagian Umum	25	-	3	13	-	1	0	7	1	-
11	Bagian Hukum	17	-	2	15	-	-	-	-	-	-
12	Bagian Tata Usaha	29	-	3	11	3	3	-	9	-	-
Jumlah		178	-	21	112	6	7	0	30	1	0

Sumber : DUK Setda 2021

Keterangan: Kondisi per Desember 2021

Menurut komposisi tingkat pendidikan, pegawai yang ada di Sekretariat Daerah dapat dikatakan memiliki kapasitas yang memadai mengingat sebagian besar pegawai memiliki pendidikan S1 dengan jumlah sebanyak 112 orang (62,92%). Rincian pegawai



Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut: pegawai berpendidikan S3 sebanyak 1 orang (0,56%), S2 sebanyak 21 orang (11,80%), D4 sebanyak 6 orang (3,70%), D3 sebanyak 7 orang (3,93%), SMA sebanyak 30 orang (16,85%), dan SMP sebanyak 1 orang (0,56%). Sementara itu jika dilihat dari golongan, jumlah pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 22 orang (11,34%), golongan III sebanyak 142 orang (73,20%), golongan II sebanyak 29 orang (14,95%), dan golongan I sebanyak 1 orang (0,52%).

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menurut Unit Kerja dan Golongan, 2021

No	Unit Kerja	Jumlah	Golongan																
			Golongan IV					Golongan III				Golongan II				Golongan I			
			E	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Asisten	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Staf Ahli Bupati	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bagian Pemerintahan	10	-	-	-	1	1	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	22	-	-	-	1	-	6	4	4	3	2	1	-	1	-	-	-	-
6	Bagian TU Pimpinan	31	-	-	-	1	-	1	8	2	10	1	4	2	2	-	-	-	-
7	Bagian BPBJ/Barjas	14	-	-	-	1	-	3	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bagian Ekbang	17	-	-	-	1	1	3	5	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-
9	Bagian Organisasi	12	-	-	-	-	1	2	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-
10	Bagian Umum	44	-	-	-	2	-	2	5	11	13	5	3	2	-	1	-	-	-
11	Bagian Hukum	16	-	-	-	-	1	3	3	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Bagian Keuangan	13	-	-	-	1	1	1	2	2	3	2	1					-	-
13	Bagian Pemdes	9	-	-	-	1	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah		193	0	0	6	9	7	25	40	36	41	10	12	4	3	1	0	0	0

Sumber : Bagian Umum Setda

Keterangan: Kondisi per Nopember 2021

## 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah dapat dikatakan relatif memadai. Fasilitas yang memadai baik



langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam rangka mendukung kinerja terdiri dari bangunan/ruang kantor, komputer (laptop dan PC), dan kendaraan bermotor (kendaraan roda 4 dan roda 2).

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021

No	Unit Kerja	Bangunan/ ruangan kerja (dalam meter)	Komputer		Mobil	Motor	Ket
			Laptop	PC			
1	Sekretaris Daerah	2 (7,2 x 3,6 m)	6	2	4	7	
2	Asisten	3 (7,2 x 3,6 m)	3	4	0	3	
3	Staf Ahli Bupati	1 (7,2 x 3,6 m)	1	2	0	1	
4	Bagian Tata Pemerintahan	7,2 x 9 x 2 ruangan	13	3	2	9	
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3 x 7 12 x 7	5	7	1	6	
6	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	2 (7,2 x 9 m)	15	11	1	11	
7	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	2 (7,2 x 9 m)	22	7	1	4	
8	Bagian Organisasi	2 (7,2 x 9 m)	8	5	1	6	
9	Bagian Umum	1 (7,2 x 3,6 m) 5 (7,2 x 9 m)	20	15	10	40	
10	Bagian Hukum	9,6 x 7,2	12	3	1	3	
11	Bagian Tata Usaha	3 (7,2 x 9 m) 7,2 x 9	14	9	1	3	
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 (7,2 x 9 m)	5	7	10	11	

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah



### 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah sesungguhnya diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah pada periode sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Sekretariat Daerah sehingga nantinya dapat digunakan sebagai pijakan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dilaksanakan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilaksanakan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai oleh Sekretariat Daerah.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah selama periode 2021-2026 dapat dikelompokkan ke dalam 14 kategori yaitu (1) terbentuknya kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai dengan karakteristik, potensi, kewenangan dan kebutuhan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) terpenuhinya aparatur yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (3) meningkatnya kemampuan dan peran koperasi UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah; (4) meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat; (5) terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai



landasan moral dan spiritual; (6) terpilihnya pemuda dan pegawai yang berprestasi dalam pembangunan dan wawasan kebangsaan; (7) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; (8) terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi pelaksanaan pemerintahan; (9) terkoordinasikannya rumusan kebijakan pemerintah daerah; (10) terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan urusan pemerintahan dan pengendalian pembangunan; (11) terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah; (12) terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (13) terwujudnya sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (14) berkembangnya kelompok usaha mandiri di perdesaan. Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah secara umum telah baik mengingat sebagian besar target telah terealisasi lebih dari 100%. Beberapa indikator kinerja yang belum mencapai rasio 100% pada tahun 2015 diantaranya adalah jumlah satuan kerja perangkat daerah yang telah dianalisa beban kerjanya (35,82%); jumlah pelaku usaha yang dibina di Kabupaten Tasikmalaya (50,00%); laju pertumbuhan investasi (81,79%); dan beberapa indikator lainnya yang tidak teridentifikasi karena realisasi capaiannya tidak diketahui (Tabel 2.5).

Dari sisi anggaran, pada pos anggaran pendapatan terjadi kenaikan pertumbuhan selama periode 2011-2015 yaitu sebesar 0,51% per tahun, sedang realisasi pendapatan tumbuh sebesar 1,59% per tahun. Sementara itu, pada pos anggaran belanja, terjadi peningkatan sebesar 5,34% per tahun, sedang realisasi belanja meningkat sebesar 3,62% per tahun. Pos belanja Sekretariat Daerah terdiri dari belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang jasa) dan belanja modal. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja operasi selama periode 2011-2015 adalah sebesar 5,41% per tahun





dan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja operasi sebesar 4,51% per tahun. Pada pos belanja modal, rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 16,63% per tahun dan rata-rata realisasi pertumbuhan sebesar 2,16% per tahun (Tabel 2.6).



Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Sekretariat Daerah	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
I.	Terbentuknya kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai dengan karakteristik, potensi, kewenangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku																	
1	Terakomodirnya seluruh kewenangan pemerintah daerah dalam organisasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	92.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2	Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbentuk sesuai PP tentang OPD yang berlaku	SKPD	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3	Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dianalisa beban kerjanya	SKPD	5	5	10	20	67	5	5	10	19	24	100.00	100.00	100.00	95.00	35.82	
4	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah memiliki uraian tugas unit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
5	Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah memiliki uraian tugas jabatan	%	5	10	10	15	20	5	10	15	20	29	100.00	100.00	150.00	133.33	145.00	
6	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh SKPD	SOP	2	5	8	11	14	3	6	6	11	14	150.00	120.00	75.00	100.00	100.00	
7	Urusan yang sudah dibuat rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Urusan	-	3	5	9	13	-	3	15	-	-	-	100.00	300.00	-	-	



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Sekretariat Daerah	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
8	Terlaksananya Survei Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.	100.	100.	100.	100.
9	Tersusunnya Pedoman dan Prosedur Kerja								-	-	1	3					
II	Terpenuhinya aparatur yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat																
1	Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan teknis, workshop dan pelatihan	Pegawai	65	70	100	66	70	48	67	66	43	106	73.8	95.7	66.0	65.1	151.
		i											5	1	0	5	43
III	Meningkatnya kemampuan dan peran koerasi UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah																
1	Kontribusi keberadaan BUMD (PD. BPR):																
	a. Total Aset	Rp	270,436,415.65	297,057.01	327,062.94	359,869.23	395,945.15	282,485.00	343,079.73	423,871.45	481,677.08	743,992.32	104.36	115.43	129.34	133.85	187.90
	b. Kredit yang disalurkan	Rp	216,016,752.35	237,618,427.59	261,380,270.35	287,518,297.38	316,270,127.12	233,173,944.00	279,862,098.42	359,041,687.33	394,374,652.02	416,743,442.46	107.94	117.78	137.36	137.17	131.77
	c. Rugi/ Laba	Rp	11,461,859.16	12,608,045.07	13,868,49.58	15,255,734.54	16,781,307.99	11,446,378.00	13,941,366.49	18,879,700.22	23,716,005.09	26,091,739.42	99.86	110.58	136.13	155.46	155.48
2	Kontribusi keberadaan BUMD (PDAM):																
	a. Total Aset	Rp	25,819,452.52	28,401,397.77	31,241,537.55	34,365,691.30	37,802,260.44	26,196,444.00	29,756,353.29	31,057,290.00	30,719,716.94	32,506,560.49	101.46	104.77	99.41	89.39	85.99



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Sekretariat Daerah	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	b. Kredit yang disalurkan	Rp	21,6 29,7 78.2 0	23,7 92,7 56.0 2	26,1 72,0 31.6 2	28,7 89,2 34.7 9	31,6 68,1 58.2 6	20,6 20,2 05.0 0	29,1 97,9 37.4 6	33,4 58,6 71.0 0	33,8 11,5 54.7 8	35,5 43,8 81.8 0	95.3 3	122. 72	127. 84	117. 45	112. 24
	c. Rugi/ Laba	Rp	2,50 6,56 6.45	2,75 7,22 3.09	3,03 2,94 5.40	3,33 6,23 9.94	3,66 9,86 3.93	4,57 5,76 6.00	5,64 1,77 2,75 4.00	- - - -	3,15 0,74 8,51 2.00	4268 910. 479	182. 55	204, 617. 93	- -	94,4 40.1 1	- -
3	Kontribusi keberadaan PDUP :																
	a. Total Aset	Rp	4,00 0,00 0.00	4,20 0,00 0.00	4,41 0,00 0.00	4,63 0,50 0.00	4,86 2,02 5.00	4,00 0,00 0.00	29,7 56,3 53.2 9	3,89 1,91 3.00	4,13 8,48 0.00	6,25 7,49 3.22	100. 00	708. 48	88.2 5	89.3 7	128. 70
	b. Rugi/ Laba	Rp	250. 00	2,62 5.00	275, 625. 00	289, 406. 00	303, 877. 00	250. 00	29,1 97,9 37.4 6	- - -	252, 000. 00	300, 000. 00	100. 00	1,11 2,30 2.38	- -	87.0 7	98.7 2
IV	Meningkatnya kegiatan Perekonomian Masyarakat																
1	Jumlah pelaku usaha yang dibina di Kab. Tasikmalaya (PMA dan PMDN)	Pelaku	50	-	100	100	100	-	2	19	4	50	-	-	19.0 0	4.00	50.0 0
2	Jumlah sarana promosi investasi (Temu Investasi, Pameran Investasi) Per Tahun	Sarana	2	2	2	2	2	2	4	5	4	3	100. 00	200. 00	250. 00	200. 00	150. 00
3	Laju Pertumbuhan Investasi	%	10.0 0	11.0 0	12.0 0	13.0 0	14.0 0	5.00	15.6 3	14.2 7	7.62	11.4 5	50.0 0	142. 09	118. 92	58.6 2	81.7 9
V	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai landasan moral dan spiritual																
1	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan:																



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Sekretariat Daerah	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	- Pondok Pesantren	Unit	248	349	594	604	703	-	394	594	604	750	-	112.89	100.00	100.00	106.69
	- Masjid	Unit	2,476	2,501	2,701	2,800	3,025	-	2,501	2,701	4,650	4,650	-	100.00	100.00	166.07	153.72
	- Madrasah	Unit	343	403	703	900	1,350	-	403	703	900	4,530	-	100.00	100.00	100.00	335.56
	- Jumlah Bantuan Stimulan Guru Madrasah Diniyah	Rp	1,000,000	1,250,000	1,500,000	1,750,000	2,000,000	-	202	502	696	920	-	0.02	0.03	0.04	0.05
	- Jumlah Guru Madrasah Diniyah	Orang	16,402	16,402	16,402	16,502	16,603	-	4,650	4,650	4,650	21,375	-	28.35	28.35	28.18	128.74
	- Majelis Talim	Kelompok	147	202	502	696	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Terpilihnya Pemuda dan Pegawai yang berprestasi dalam pembangunan dan wawasan kebangsaan																
1	Meningkatnya wawasan kebangsaan	Pegawai	-	19	19	-	19	-	19	19	-	21	-	100.00	100.00	-	110.53
VII	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai																
1	Tingkat pemenuhan dasar operasional	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	58.49	58.49	100.00	100.00	100.00	58.49	58.49	100.00	100.00
2	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan Dinas	Pegawai	-	-	2,446	2,016	2,016	-	2,446	1,671	923	2,612	-	-	68.32	45.78	129.56
3	Terwujudnya fasilitas penunjang pemerintahan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	68.47	85.00	100.00	100.00	100.00	68.47	85.00	100.00	100.00
VIII	Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi pelaksanaan pemerintahan																
1	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional																
	Media massa seperti majalah, koran, radio dan televisi	Frekuensi	5,000	5,400	5,625	5,825	5,825	13,000	12,000	11,250	15,100	13,141	260.00	222.22	200.00	259.23	225.60
	Media Luar ruang																



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Sekretariat Daerah	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Buletin	Eks	-	1,250	-	-	4,492	-	1,250	-	-	4,992	-	100.00	-	-	111.13
	Stiker	Eks	-	30,000	30,000	-	-	-	30,000	30,000	58,394	30,000	-	100.00	100.00	-	-
	Banner	Eks	-	125	-	-	-	-	125	-	120	-	-	100.00	-	-	-
	Baliho	Eks	-	50	60	-	-	-	60	60	60	60	-	120.00	-	-	-
	Spanduk	Eks	-	-	120	60	48	-	-	120	60	48	-	-	-	-	-
	Pamphlet arkilik	Eks	-	-	-	175	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-
	Leaflet	Eks	-	-	1000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-
IX	Terkoordinasikannya rumusan kebijakan Pemerintah Daerah																
	1	Jumlah kebijakan yang terfasilitasi															
	Perda	Jumlah	10	10	10	10	10	15	10	11	11	8	150.00	100.00	110.00	110.00	80.00
	Perbup	Jumlah	40	-	-	-	-	57	49	49	44	44	142.50	0,97	-	-	-
	Kepbup	Jumlah	300	-	-	-	-	552	419	375	307	307	184.00	0,97	-	-	-
	MoU	Jumlah	-	-	-	-	-	-	10	14	12	13	-	0,97	-	-	-
	2	Jumlah kunjungan kerja ke daerah															
	Jumlah Penerimaan kunjungan kerja	Jumlah	36	36	36	24	-	-	36	36	24	29	-	100.00	100.00	100.00	-
X	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan urusan pemerintahan dan pengendalian pembangunan																
	1	Jumlah kegiatan yang terkendali															
	Jumlah kegiatan yang terkendali	Jumlah	726	726	-	100	100	707	707	100	100	100	97.38	97.38	-	100.00	100.00



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Sekretariat Daerah	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
	2	Terealisasinya hasil Evaluasi, Monitoring dan laporan kegiatan secara berkala	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.	100.	100.	100.	100.
	3	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	Paket	71	100	100	100	100	-	733	574	527	622	-	733.	574.	527.	622.
XI	Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah																	
	1	Terimplementasikannya sistem anggaran yang berbasis kinerja	%	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.
	2	Terlaksananya sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah	%	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.
XII	Terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)																	
	1	Tersusunnya RENSTRA dan LAKIP pada setiap SKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
XIII	Terwujudnya sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah																	
	1	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
XIV	Berkembangnya kelompok usaha mandiri di perdesaan																	
	1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan																
		Ketersediaan energi dan protein perkapita	kkal	-	-	-	90.0	-	-	-	92.8	92.8	93.0	-	-	-	103.	-



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Sekretariat Daerah	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Penguatan Cadangan Pangan	kkal	-	-	-	60.0 0	-	-	-	-	22.0 0	48.3 0	-	-	-	36.6 7	-
2	Distribusi dan Akses Pangan																
	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	89.4 1	89.4 1	77.2 6	-	-	-	-	-
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	-	-	-	-	-	-	-	101. 47	100. 00	100. 00	-	-	-	-	-
3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan																
	Skor Pola Pangan harapan	Poin	-	-	-	72.5 0	-	-	-	-	67.1 0	-	-	-	-	92.5 5	-
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	-	-	-	60.0 0	-	-	-	-	10.0 0	10.0 0	-	-	-	16.6 7	-
4	Penanganan Kerawanan pangan																
	Penanganan Daerah Rawan pangan	%	-	-	4.00	90.0 0	-	-	-	3.00	66.6 7	-	-	0,97	75.0 0	74.0 8	-





Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2011-2015

No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>11,457,828,585</b>	<b>8,722,022,600</b>	<b>8,594,750,000</b>	<b>8,209,000,000</b>	<b>8,444,372,500</b>	<b>10,666,580,486</b>	<b>7,942,016,506</b>	<b>7,239,608,715</b>	<b>6,790,523,312</b>	<b>7,337,465,097</b>	<b>93.09</b>	<b>91.06</b>	<b>84.23</b>	<b>82.72</b>	<b>86.89</b>	<b>(6.74)</b>	<b>(8.13)</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,184,918,200	1,465,000,000	1,464,000,000	1,800,000,000	1,508,400,000	3,999,013,011	1,102,299,163	1,079,074,324	1,092,837,146	1,140,332,998	95.56	75.24	73.71	60.71	75.6	(14.58)	(17.23)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	583,660,000	850,000,000	600,000,000	580,000,000	564,000,000	556,834,570	844,188,410	459,034,908	378,435,000	398,536,000	95.4	99.32	76.51	65.25	70.66	2.53	(1.57)
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	107,179,900	200,000,000	180,000,000	200,000,000	199,350,000	104,129,200	163,280,340	177,490,760	181,088,413	170,356,660	97.15	81.64	98.61	90.54	85.46	21.85	15.40
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	300,000,000	450,000,000	474,150,000	-	-	290,934,000	443,622,800	463,770,500	-	-	96.98	98.58	97.81	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	645,000,000	745,000,000	800,000,000	600,000,000	659,275,000	640,733,675	744,384,675	770,881,113	568,479,900	626,227,400	99.34	99.92	96.36	94.75	94.99	1.94	0.91
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	830,620,485	900,000,000	800,000,000	645,000,000	662,450,000	782,817,400	898,560,400	768,942,960	609,543,300	609,772,050	94.24	99.84	96.12	94.5	92.05	(4.86)	(5.08)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	591,340,000	804,000,000	841,250,000	450,000,000	679,730,000	580,357,880	793,435,800	817,253,600	424,858,950	524,854,700	98.14	98.69	97.15	94.41	77.22	11.28	3.81
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	155,000,000	50,000,000	225,000,000	200,000,000	250,000,000	153,177,000	49,900,000	224,850,000	199,748,250	235,984,500	98.82	99.8	99.93	99.87	94.39	74.04	72.54



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Makanan dan Minuman	2,087,810,000	2,410,320,600	2,100,000,000	2,150,000,000	2,413,017,500	2,085,246,750	2,400,812,900	2,017,387,500	2,095,266,180	2,255,917,900	99.88	99.61	96.07	97.45	93.49	4.30	2.67
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2,174,600,000	1,200,000,000	1,200,000,000	950,000,000	950,000,000	1,674,091,000	855,302,818	557,059,550	654,894,673	840,412,389	76.98	71.28	46.42	68.94	88.46	(16.41)	(9.47)
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	84,500,000	84,500,000	84,500,000	84,000,000	84,000,000	77,300,000	76,700,000	76,700,000	76,700,000	71,300,000	91.48	90.77	90.77	91.31	84.88	(0.15)	(1.95)
	Penyedia Jasa Pengamanan Kantor	13,200,000	13,200,000	-	-	-	12,880,000	13,152,000	-	-	-	97.58	99.64	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	65,048,700	-	-	-	-	65.05	-	-	-
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>6,193,194,400</b>	<b>12,406,921,200</b>	<b>8,278,747,800</b>	<b>6,792,000,000</b>	<b>5,942,350,000</b>	<b>6,057,618,245</b>	<b>12,016,450,472</b>	<b>8,092,172,924</b>	<b>6,544,341,395</b>	<b>5,430,258,975</b>	<b>97.81</b>	<b>96.85</b>	<b>97.75</b>	<b>96.35</b>	<b>91.38</b>	<b>9.15</b>	<b>7.39</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	513,500,000	4,301,070,000	3,163,126,800	1,191,450,000	291,075,000	502,143,300	4,207,548,500	3,083,609,700	1,145,705,500	260,844,700	97.79	97.83	97.49	96.16	89.61	143.31	142.78
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	433,142,000	376,337,000				429,795,700	375,014,500				99.23	99.65	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	665,770,000	464,215,400	572,000,000	165,000,000	507,091,200	659,677,225	459,255,230	563,338,000	141,903,800	401,944,000	99.08	98.93	98.49	86	79.26	32.28	25.18
	Pengadaan Mebeulair	432,250,000	813,875,000	129,400,000	693,300,000	521,618,700	429,560,700	812,174,500	124,545,000	674,542,000	486,179,600	99.38	99.79	96.25	97.29	93.21	103.80	104.52



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Alat Studio/Pengadaan Sarana Kantor	201,029,900	305,000,000	409,771,000	199,000,000	172,795,000	199,953,900	274,671,000	407,750,000	196,569,300	162,617,000	99.46	90.06	99.51	98.78	94.11	5.37	4.19
	Pengadaan Komputer	199,115,000	285,000,000	354,750,000	978,250,000	633,846,800	197,750,700	283,079,000	347,581,000	964,991,000	470,763,500	99.31	99.33	97.98	98.64	74.27	52.04	48.09
	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	238,173,800	270,000,000	50,000,000	315,125,000	-	212,170,000	267,762,000	41,590,000	255,025,000	-	89.08	99.17	83.18	80.93	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	551,400,000	800,000,000	400,000,000	400,000,000	418,575,000	537,860,310	623,868,402	356,254,140	385,064,200	412,173,800	97.54	77.98	89.06	96.27	98.47	(0.07)	(2.94)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,736,987,500	2,473,250,000	2,269,700,000	2,570,000,000	2,550,000,000	1,736,542,740	2,471,542,530	2,259,395,034	2,493,140,995	2,530,943,175	99.97	99.93	99.55	97.01	99.25	11.65	11.40
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	450,000,000	550,000,000	435,000,000	425,000,000	532,223,300	441,097,870	547,749,710	408,510,050	422,984,600	449,768,200	98.02	99.59	93.91	99.53	84.51	6.06	2.16
	Pengadaan Alat Komunikasi	110,000,000	300,000,000	275,000,000	120,000,000		107,815,900	297,639,100	273,428,000	77,850,000		98.01	99.21	99.43	64.88	-	2.01	(0.90)
	Pengadaan Mebeulair (Banprov 2011)	750,000,000	1,500,000,000				733,449,800	1,451,738,000				97.79	96.78	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Design Interior (Banprov 2011)	150,000,000					81,970,100					54.65	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>65,000,000</b>	<b>234,826,200</b>	<b>154,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>381,750,000</b>	<b>64,887,500</b>	<b>233,923,500</b>	<b>148,805,600</b>	<b>149,470,000</b>	<b>360,834,500</b>	<b>99.83</b>	<b>99.62</b>	<b>96.63</b>	<b>99.65</b>	<b>94.52</b>	<b>94.69</b>	<b>91.49</b>



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	65,000,000	234,826,200	154,000,000	150,000,000	381,750,000	64,887,500	233,923,500	148,805,600	149,470,000	360,834,500	99.83	99.62	96.63	99.65	94.52	94.69	91.49
	Penyusunan Pakaian Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>400,000,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>225,000,000</b>	<b>325,000,000</b>	<b>211,835,000</b>	<b>333,676,000</b>	<b>139,857,500</b>	<b>161,553,000</b>	<b>284,747,700</b>	<b>52.96</b>	<b>95.34</b>	<b>46.62</b>	<b>71.8</b>	<b>87.61</b>	<b>(1.84)</b>	<b>22.80</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	400,000,000	350,000,000	300,000,000	225,000,000	200,000,000	211,835,000	333,676,000	139,857,500	161,553,000	176,833,100	52.96	95.34	46.62	71.8	88.42	(15.72)	6.10
	Kegiatan Pembinaan Keprotokolan Bagi Aparatur Kecamatan	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	39,635,000	-	-	-	-	79.27	-	-
	Workshop Kehumasan dan Jurnalistik	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	68,279,600	-	-	-	-	91.04	-	-
<b>5</b>	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>1,985,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,575,000</b>	<b>1,973,832,076</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,102,500</b>	<b>99.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Tanah	1,985,000,000	-	-	-	-	1,973,832,076	-	-	-	-	99.44	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pengembangan dan Penegasan Batas Wilayah Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan	-	-	-	-	43,575,000	-	-	-	-	33,102,500	-	-	-	-	75.97	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	untuk Kepentingan Umum																	
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	<b>125,000,000</b>	<b>2,110,000,000</b>	<b>725,000,000</b>	<b>1,120,000,000</b>	<b>2,947,664,944</b>	<b>117,660,000</b>	<b>2,053,924,372</b>	<b>717,434,038</b>	<b>1,100,032,362</b>	<b>2,841,091,033</b>	<b>94.13</b>	<b>97.34</b>	<b>98.96</b>	<b>98.22</b>	<b>96.38</b>	<b>435.01</b>	<b>448.04</b>
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan	50,000,000	180,000,000				49,685,000	173,932,172				99.37	96.63	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi Raskin	-	-	150,000,000	100,000,000	150,000,000	-	-	146,517,506	100,000,000	146,400,000	-	-	97.68	100	97.6	-	-
	Pendampingan Pembangunan Ketahanan Pangan	75,000,000	230,000,000	100,000,000			67,975,000	198,805,000	97,463,532			90.63	86.44	97.46	-	-	-	-
	Pengembangan Penganekaragaman, Keamanan Konsumsi dan Mutu Pangan	-	200,000,000	20,000,000				191,310,000	19,980,000			-	95.66	99.9	-	-	-	-
	Sistem Informasi Geografis Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan	-	1,500,000,000					1,489,877,200				-	99.33	-	-	-	-	-
	Rakor Dewan Ketahanan Pangan	-	-	65,000,000			-	-	63,560,000			-	-	97.78	-	-	-	-
	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	-	-	60,000,000			-	-	59,995,000			-	-	99.99	-	-	-	-
	Pengembangan Sistem Distribusi Pangan	-	-	30,000,000			-	-	29,950,000			-	-	99.83	-	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	-	-	50,000,000			-	-	50,000,000			-	-	100	-	-	-	-
	Penyusunan Skor Neraca Bahan Makanan (NBM), Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah	-	-	125,000,000			-	-	124,988,000			-	-	99.99	-	-	-	-
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	-	-	50,000,000					49,980,000			-	-	99.96	-	-	-	-
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	-	-	75,000,000		220,000,000	-	-	75,000,000		181,405,000	-	-	100	-	82.46	-	-
	Pendampingan SIG, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	-	-		50,000,000				48,375,000			-	-	-	96.75	-	-	-
	Penilaian Adykarya Pangan Nusantara (APN)	-	-		100,000,000				100,000,000			-	-	-	100	-	-	-
	PENAS	-	-		125,000,000				125,000,000			-	-	-	100	-	-	-
	Pendampingan Desa Mandiri Pangan	-	-		25,000,000				24,995,000			-	-	-	99.98	-	-	-
	Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari	-	-		25,000,000				25,000,000			-	-	-	100	-	-	-
	Aksi P2KP	-	-		25,000,000				25,000,000			-	-	-	100	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Peningkatan Mutu dan Ketahanan Pangan	-	-			50,000,000	-	-			46,932,000	-	-	-	-	93.86	-	-
	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	-	-		275,000,000	250,000,000	-	-		264,491,000	248,215,000	-	-	-	96.18	99.29	-	-
	Pendampingan Lumbung Pangan Masyarakat	-	-		45,000,000	478,420,000	-	-		44,875,000	475,753,400	-	-	-	99.72	99.44	-	-
	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-	-		200,000,000	500,000,000	-	-		192,586,362	465,136,289	-	-	-	96.29	93.03	-	-
	Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	-	-		25,000,000	50,000,000	-	-		24,900,000	49,300,000	-	-	-	99.6	98.6	-	-
	Pendampingan Penumbuhan Lingbasrangan	-	-		25,000,000	75,000,000	-	-		24,815,000	74,440,000	-	-	-	99.26	99.25	-	-
	Sosialisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	-	-		100,000,000	450,000,000	-	-		99,995,000	444,347,500	-	-	-	100	98.74	-	-
	Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)	-	-			111,580,000	-	-			106,914,900	-	-	-	-	95.82	-	-
	Panel Harga	-	-			32,664,944	-	-			31,764,944	-	-	-	-	97.24	-	-
	Gerakan Aksi Daerah Pangan dan Gizi	-	-			150,000,000	-	-			144,865,000	-	-	-	-	96.58	-	-
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	-			300,000,000	-	-			295,667,000	-	-	-	-	98.56	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Sistem Informasi Geografis (SIG)	-	-			55,000,00	-	-			55,000,00	-	-	-	-	100	-	-
	Harga Pangan Se Dunia	-	-			75,000,00	-	-			74,950,00	-	-	-	-	99.93	-	-
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>3,950,000,000</b>	<b>3,950,000,000</b>	<b>4,051,025,000</b>	<b>2,973,000,000</b>	<b>2,771,700,000</b>	<b>3,927,012,000</b>	<b>3,915,638,500</b>	<b>2,925,164,000</b>	<b>2,516,773,950</b>	<b>2,341,152,800</b>	<b>99.42</b>	<b>99.13</b>	<b>72.21</b>	<b>84.65</b>	<b>84.47</b>	<b>(7.71)</b>	<b>(11.63)</b>
	Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	383,000,000	392,500,000	392,500,000	52,007,000	52,007,000	376,702,500	390,001,000	297,507,000	47,194,500	51,615,750	98.36	99.36	75.8	90.75	99.25	(21.07)	(23.74)
	Penerima Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	200,000,000	200,000,000	225,000,000	114,093,000	69,793,000	195,662,500	196,857,500	147,075,000	82,445,500	55,581,000	97.83	98.43	65.37	72.26	79.64	(18.90)	(25.30)
	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	275,000,000	275,000,000	300,000,000	364,171,000	333,671,000	274,975,000	260,210,000	256,600,000	354,383,350	305,129,250	99.99	94.62	85.53	97.31	91.45	5.53	4.36
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	150,000,000	200,000,000	200,000,000	69,300,000	59,100,000	147,825,000	196,032,500	115,369,000	58,178,750	55,321,500	98.55	98.02	57.68	83.95	93.61	(11.68)	(15.75)
	Kunjungan Kerja/Inspeksi	600,000,000	600,000,000	600,000,000	592,977,000	576,677,000	599,545,000	597,040,000	470,790,000	305,435,000	250,505,750	99.92	99.51	78.47	51.51	43.44	(0.98)	(18.67)





No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah																	
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Lainnya	1,575,000,000	1,695,000,000	1,746,025,000	999,676,000	949,676,000	1,569,250,000	1,690,659,500	1,306,147,000	988,229,750	941,574,300	99.63	99.74	74.81	98.86	99.15	(9.28)	(11.02)
	Menghadiri Rapat dan Undangan di Luar Daerah (Propinsi/Pusat)	587,500,000	587,500,000	587,500,000	730,776,000	730,776,000	586,110,000	584,838,000	331,676,000	631,657,100	681,425,250	99.76	99.55	56.46	86.44	93.25	6.10	13.70
	Forum Group Discussion (FGD)	179,500,000		-	50,000,000		176,942,000		-	49,250,000		98.57	-	-	98.5	-	-	-
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>150,000,000</b>	<b>175,000,000</b>	<b>175,000,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>489,000,000</b>	<b>124,965,200</b>	<b>133,806,250</b>	<b>133,569,500</b>	<b>316,272,300</b>	<b>175,575,600</b>	<b>83.31</b>	<b>76.46</b>	<b>76.33</b>	<b>90.36</b>	<b>35.91</b>	<b>39.10</b>	<b>24.80</b>
	Penyusunan Analisis Standar Belanja	35,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	28,037,700	39,048,050	26,512,000	20,862,500	25,804,000	80.11	78.1	53.02	41.73	51.61	<b>10.71</b>	<b>2.39</b>
	Penyusunan Standar Satuan Harga	40,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	89,000,000	35,472,500	34,476,200	32,225,000	146,850,000	45,815,000	88.68	68.95	64.45	97.9	51.48	<b>46.08</b>	<b>69.39</b>
	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	50,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	49,000,000	60,282,000	74,832,500	74,919,600	62,144,200	98	80.38	99.78	99.89	82.86	<b>12.50</b>	<b>7.56</b>
	Penyusunan RKA/DPA	25,000,000					12,455,000					49.82	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Pengelolaan	-	-	-	75,000,000	175,000,000	-	-	-	73,640,200	-	-	-	-	98.19	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Keuangan Sekretariat Daerah																	
	Sosialisasi dan Implementasi SAP Berbasis Akruwal	-	-			100,000,000	-				41,812,400	-	-	-	-	41.81	-	-
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>150,000,000</b>	-	-	-	-	<b>110,446,600</b>	-	-	-	-	<b>73.63</b>	-	-	-	-	-	-
	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	150,000,000					110,446,600					73.63	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>	<b>250,000,000</b>	<b>1,185,000,000</b>	<b>1,350,000,000</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>1,749,000,000</b>	<b>249,725,000</b>	<b>1,181,362,500</b>	<b>1,287,520,200</b>	<b>1,765,849,471</b>	<b>1,722,958,074</b>	<b>99.89</b>	<b>99.69</b>	<b>95.37</b>	<b>98.1</b>	<b>98.51</b>	<b>104.61</b>	<b>104.19</b>
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	250,000,000	870,000,000	900,000,000	1,100,000,000	1,200,000,000	249,725,000	869,400,000	895,810,000	1,096,405,000	1,193,737,800	99.89	99.93	99.53	99.67	99.48	<b>70.69</b>	<b>70.61</b>
	Pembuatan Buletin Sukapura	-	30,000,000			214,000,000	-	29,937,500			208,158,000	-	99.79	-	-	97.27	-	-
	Publikasi Informasi Visi Misi	-	285,000,000	250,000,000	400,000,000	150,000,000	-	282,025,000	248,450,000	393,490,150	147,151,000	-	98.96	99.38	98.37	98.1	-	-
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	-	-	100,000,000	50,000,000	135,000,000	-	-	75,729,200	43,016,500	124,525,000	-	-	75.73	86.03	92.24	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal	-	-	100,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	67,531,000	44,057,821	49,386,274	-	-	67.53	88.12	98.77	-	-
	Pengkajian dan Penyusunan Buku Sejarah Kabupaten Tasikmalaya	-	-		200,000,000					188,880,000		-	-	-	94.44	-	-	-
<b>11</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>59,050,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>820,000,000</b>	<b>57,665,000</b>	<b>230,530,000</b>	<b>1,630,802,700</b>	<b>374,141,500</b>	<b>806,615,000</b>	<b>97.65</b>	<b>92.21</b>	<b>95.93</b>	<b>83.14</b>	<b>98.37</b>	<b>228.02</b>	<b>236.43</b>
	Pembekalan Bagi Kepala Daerah Baru	-	75,000,000	200,000,000	100,000,000	150,000,000		71,920,000	199,849,600	80,050,000	149,700,000	-	95.89	99.92	80.05	99.8	-	-
	Monitoring Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	44,050,000	25,000,000	200,000,000	150,000,000	150,000,000	42,665,000	25,000,000	182,428,700	100,275,000	137,515,000	96.86	100	91.21	66.85	91.68	157.94	145.10
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	15,000,000	75,000,000	500,000,000	200,000,000	250,000,000	15,000,000	61,690,000	476,309,400	193,816,500	250,000,000	100	82.25	95.26	96.91	100	232.92	238.26
	Pembekalan Bagi Anggota Badan Pemusyawaratan Desa	-	75,000,000	200,000,000		150,000,000	-	71,920,000	197,000,000		149,700,000	-	95.89	98.5	-	99.8	-	-
	Penyusunan Inventarisasi Tanah Kas Desa	-	-	200,000,000		-	-	-	179,340,000		-	-	-	89.67	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	-	-	100,000,000		-	-	-	98,200,000		-	-	-	98.2	-	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa untuk Aparat Desa	-	-	300,000,000		-	-	-	297,675,000		-	-	-	99.23	-	-	-	-
	Pembekalan Bagi Perangkat Desa	-	-			120,000,000	-	-			119,700,000	-	-	-	-	99.75	-	-
<b>1</b>	<b>Program</b>	<b>200,000,000</b>	<b>725,000,000</b>	<b>425,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>-</b>	<b>199,081,500</b>	<b>672,036,600</b>	<b>424,591,000</b>	<b>492,623,200</b>	<b>-</b>	<b>99.54</b>	<b>92.69</b>	<b>99.9</b>	<b>98.52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>																	
	Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berpartisipasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya	200,000,000	425,000,000	425,000,000	500,000,000		199,081,500	422,767,800	424,591,000	492,623,200		99.54	99.47	99.9	98.52	-	<b>7.54</b>	<b>7.20</b>
	Festival Olahraga Tradisional	-	300,000,000				-	249,268,800				-	83.09	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>Program</b>	<b>840,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>794,876,620</b>	<b>1,446,674,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94.63</b>	<b>96.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>																	
	Sinergitas Pengebangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pelaporan Data Pengendalian Pembangunan (Banprov 2011)	840,000,000					794,876,620					94.63	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Berbasis Geografis	-	1,500,000,000				-	1,446,674,400				-	96.44	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>975,000,000</b>	<b>610,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>1,023,000,000</b>	<b>710,000,000</b>	<b>762,745,500</b>	<b>468,021,500</b>	<b>465,477,000</b>	<b>846,078,900</b>	<b>597,785,240</b>	<b>78.23</b>	<b>76.72</b>	<b>77.58</b>	<b>82.71</b>	<b>84.2</b>	<b>0.21</b>	<b>3.31</b>
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundang-undangan	150,000,000	212,500,000	150,000,000	150,000,000	175,000,000	117,767,600	123,350,000	86,025,000	138,225,000	169,305,000	78.51	58.05	57.35	92.15	96.75	<b>7.23</b>	<b>14.41</b>
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	150,000,000	105,000,000				78,295,000	69,930,000				52.2	66.6	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (RANHAM)	150,000,000	105,000,000	200,000,000	175,000,000	110,000,000	140,885,000	95,492,000	182,067,000	166,080,400	96,124,000	93.92	90.94	91.03	94.9	87.39	<b>2.71</b>	<b>1.88</b>
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	75,000,000	187,500,000	250,000,000	250,000,000	200,000,000	69,740,000	179,249,500	197,385,000	228,296,000	178,941,240	92.99	95.6	78.95	91.32	89.47	<b>40.83</b>	<b>40.30</b>
	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang	100,000,000					79,975,000					79.98	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Baru, Lebih Tinggi dan Keserasiannya antar Peraturan Perundang-undangan Daerah																	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,000,000					49,900,000					99.8	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	150,000,000					114,857,700					76.57	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Tata Ruang Wilayah	150,000,000					111,325,200					74.22	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Ranperda Tentang Desa	-	-			100,000,000	-	-			92,865,000	-	-	-	-	92.87	-	-
	Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Pemerintah Daerah	-	-		125,000,000	125,000,000	-	-		51,817,500	60,550,000	-	-	-	41.45	48.44	-	-
	Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Pajak Rokok	-	-		323,000,000	-	-	-		261,660,000	-	-	-	-	81.01	-	-	-
<b>15</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah</b>	<b>60,000,000</b>	<b>335,000,000</b>	<b>588,500,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>50,923,000</b>	<b>284,734,500</b>	<b>495,087,750</b>	<b>363,721,500</b>	<b>239,518,500</b>	<b>84.87</b>	<b>85</b>	<b>84.13</b>	<b>80.83</b>	<b>79.84</b>	<b>119.28</b>	<b>118.09</b>



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pembinaan Aparatur Daerah Tingkat Kecamatan	10,000,000	85,000,000	90,000,000			8,800,000	82,840,000	90,000,000			88	97.46	100	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	50,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	42,123,000	93,098,000	88,728,000	99,962,500	92,794,000	84.25	93.1	88.73	99.96	92.79	<b>25.00</b>	<b>30.45</b>
	Lomba Kecamatan	-	150,000,000	100,000,000	50,000,000	150,000,000	-	108,796,500	88,654,750	34,120,000	100,206,000	-	72.53	88.65	68.24	66.8	-	-
	Fasilitasi Lomba Pelayanan Publik	-		30,000,000					21,730,000			-	-	72.43	-	-	-	-
	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		30,000,000					26,680,000			-	-	88.93	-	-	-	-
	Analisis Beban Kerja	-		238,500,000					179,295,000			-	-	75.18	-	-	-	-
	Road Map Reformasi Birokrasi	-			200,000,000				194,710,000			-	-	-	97.36	-	-	-
	Pembinaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	-		-	50,000,000				-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi LHKPN	-	-		50,000,000	50,000,000	-	-		34,929,000	46,518,500	-	-	-	69.86	93.04	-	-
<b>16</b>	<b>Program Peningkatan System Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	<b>195,980,000</b>	<b>175,000,000</b>	<b>320,000,000</b>	<b>259,500,000</b>	<b>235,000,000</b>	<b>195,980,000</b>	<b>175,000,000</b>	<b>294,212,250</b>	<b>214,349,999</b>	<b>220,661,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>91.94</b>	<b>82.6</b>	<b>93.9</b>	<b>10.95</b>	<b>8.30</b>
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan	150,000,000	150,000,000	150,000,000	200,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	149,150,000	169,799,999	145,700,000	100	100	99.43	84.9	97.13	<b>2.08</b>	<b>(0.23)</b>



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pemerintah Daerah (LPPD & ILPPD)																	
	LPOD	10,000,00	25,000,00	25,000,00	34,500,00	35,000,00	10,000,00	25,000,00	24,975,00	30,350,00	31,100,00	100	100	99.9	87.97	88.86	<b>47.36</b>	<b>43.47</b>
	Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan Bupati Tasikmalaya	35,980,00					35,980,00					100	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	-	-	25,000,00			-	-	15,625,00			-	-	62.5	-	-	-	-
	Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa	-	-	25,000,00			-	-	20,805,00			-	-	83.22	-	-	-	-
	Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	-	-	25,000,00			-	-	18,457,250			-	-	73.83	-	-	-	-





No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	-	35,000,00		-	-	-	32,200,00		-	-	-	92	-	-	-	-
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa	-	-	35,000,00		-	-	-	33,000,00		-	-	-	94.29	-	-	-	-
	TEPPA	-	-		25,000,00	-	-	-		14,200,00	-	-	-	-	56.8	-	-	-
	Fasilitasi Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah	-	-			50,000,00	-	-			43,861,00	-	-	-	-	87.72	-	-
<b>17</b>	<b>Program Pemantauan dan Kegiatan Pengevaluasian serta Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah</b>	<b>465,000,000</b>	<b>800,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>1,125,000,000</b>	<b>335,005,850</b>	<b>766,067,000</b>	<b>664,843,000</b>	<b>825,532,500</b>	<b>976,717,500</b>	<b>72.04</b>	<b>95.76</b>	<b>66.48</b>	<b>75.05</b>	<b>86.82</b>	<b>27.33</b>	<b>39.49</b>
	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah	150,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	135,944,000	172,287,000	116,672,500	115,657,500	103,797,000	90.63	86.14	58.34	57.83	51.9	<b>8.33</b>	<b>(4.17)</b>
	Peningkatan Layanan Sekretariat	240,000,000	600,000,000	800,000,000	850,000,000	800,000,000	127,829,850	593,780,000	548,170,500	663,020,000	782,742,000	53.26	98.96	68.52	78	97.84	<b>45.93</b>	<b>98.96</b>



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Barang / Jasa																	
	Sinergitas Pengendalian Pembangunan Kepada 26 Kab/Kota di Jawa Barat (Banprov 2011)	75,000,00	-			-	71,232,00	-			-	94.98	-	-	-	-	-	-
	Updating Data Hasil Pembangunan	-	-		50,000,00	75,000,00	-	-		46,855,00	69,740,00	-	-	-	93.71	92.99	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah	-	-			50,000,00	-	-			20,438,50	-	-	-	-	40.88	-	-
<b>18</b>	<b>Program Penataan Kelembagaan</b>	<b>50,000,00</b>	<b>250,000,000</b>	<b>659,750,000</b>	<b>717,000,000</b>	<b>980,000,000</b>	<b>49,349,000</b>	<b>200,524,500</b>	<b>496,052,000</b>	<b>673,254,140</b>	<b>825,038,100</b>	<b>98.7</b>	<b>80.21</b>	<b>75.19</b>	<b>93.9</b>	<b>84.19</b>	<b>152.31</b>	<b>128.00</b>
	Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	50,000,00	100,000,000				49,349,000	72,014,500				98.7	72.01	-	-	-	-	-
	Analisis Jabatan	-	100,000,000	92,000,000	100,000,000	200,000,000	-	84,170,000	71,580,000	85,905,000	160,429,500	-	84.17	77.8	85.91	80.21	-	-
	Road Map Reformasi Birokrasi	-	-	187,750,000			-	-	126,616,000			-	-	67.44	-	-	-	-
	Kajian Kelembagaan	-	-	180,000,000			-	-	118,981,000			-	-	66.1	-	-	-	-
	Evaluasi Jabatan	-	-	200,000,000			-	-	178,875,000			-	-	89.44	-	-	-	-
	Analisis Beban Kerja	-	-		250,000,000	50,000,000	-	-		243,385,000	43,615,000	-	-	-	97.35	87.23	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Penataan Kelembagaan	-	-		100,000,000		-	-		94,765,000		-	-	-	94.77	-	-	-
	Penyesuaian Uraian Tugas Unit	-	-		75,000,000		-	-		69,749,140		-	-	-	93	-	-	-
	Kajian Penataan Fungsi Organisasi Kecamatan	-	-		95,000,000		-	-		83,050,000		-	-	-	87.42	-	-	-
	Penyusunan Data Base Kelembagaan	-	-		97,000,000		-	-		96,400,000		-	-	-	99.38	-	-	-
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	-	-			150,000,000	-	-		147,727,000		-	-	-	98.48	-	-	-
	Evaluasi Kelembagaan OPD Kecamatan	-	-			100,000,000	-	-		94,353,500		-	-	-	94.35	-	-	-
	Evaluasi Kelembagaan Non Struktural	-	-			95,000,000	-	-		83,174,000		-	-	-	87.55	-	-	-
	Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-			100,000,000	-	-		89,799,000		-	-	-	89.8	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi SKPD	-	-			100,000,000	-	-		67,439,500		-	-	-	67.44	-	-	-
	Inventarisasi Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumentasi Urusan Pemerintah	-	-			140,000,000	-	-		104,235,400		-	-	-	74.45	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Fasilitasi FORSESDASI	-	-			45,000,00	-	-			34,265,200	-	-	-	-	76.14	-	-
	Sosialisasi Kelembagaan Baru	-	50,000,00			-	-	44,340,00			-	-	88.68	-	-	-	-	-
<b>19</b>	<b>Program Penataan Ketatalaksanaan</b>	-	<b>150,000,000</b>	<b>172,500,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	-	<b>127,406,000</b>	<b>148,405,000</b>	<b>47,041,500</b>	<b>59,310,000</b>	-	<b>84.94</b>	<b>86.03</b>	<b>94.08</b>	<b>98.85</b>	-	-
	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	-	50,000,00				-	45,046,00				-	90.09	-	-	-	-	-
	Penyusunan dan Sosialisasi SOP	-	50,000,00				-	44,102,500				-	88.21	-	-	-	-	-
	Penyusunan dan Sosialisasi SPM	-	50,000,00	122,500,000		30,000,000	-	38,257,500	103,275,000		29,695,000	-	76.52	84.31	-	98.98	-	-
	Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas	-	-			30,000,000	-	-			29,615,000	-	-	-	-	98.72	-	-
	Sosialisasi Ketatalaksanaan	-	-	50,000,000			-	-	45,130,000			-	-	90.26	-	-	-	-
	Penyusunan SOP	-	-		50,000,000		-	-		47,041,500		-	-	-	94.08	-	-	-
<b>20</b>	<b>Program Peningkatan Fungsi Penanggulangan Bencana</b>	<b>200,000,000</b>	-	-	-	-	<b>190,322,550</b>	-	-	-	-	<b>95.16</b>	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penguatan Kesekretariatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	200,000,000					190,322,550					95.16	-	-	-	-	-	-
<b>21</b>	<b>Program Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	-	<b>315,000,000</b>	-	<b>30,000,000</b>	-	-	<b>312,084,550</b>	-	<b>14,825,000</b>	-	-	<b>99.07</b>	-	<b>49.42</b>	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Fasilitasi Kerjasama Daerah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Presiden RI pada Ijtima Ulama Se-Indonesia	-	250,000,000				-	247,647,050				-	99.06	-	-	-	-	-
	Publikasi Informasi Kunjungan Kerja Presiden RI pada Iztima Ulama Se-Indonesia IV	-	55,000,000				-	54,750,000				-	99.55	-	-	-	-	-
	Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja Presiden RI pada Iztima Ulama se-Indonesia IV	-	10,000,000				-	9,687,500				-	96.88	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	-			30,000,000				14,825,000			-	-	-	49.42	-	-	-
<b>2</b>	<b>Program Penataan</b>	-	<b>5,050,000</b>	<b>8,300,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	-	<b>3,547,575,759</b>	<b>267,884,300</b>	<b>34,337,000</b>	<b>16,465,000</b>	-	<b>70.25</b>	<b>3.23</b>	<b>34.34</b>	<b>32.93</b>	-	-
<b>2</b>	<b>Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>																	
	Pengadaan Tanah untuk Stadion Olahraga di Kawasan Pusat Pemerintahan	-	5,000,000				-	3,531,110,759				-	70.62	-	-	-	-	-
	Pengadaan Jalan Masuk Pusat Kawasan Pemerintahan	-		7,500,000,000			-		69,896,300			-	-	0.93	-	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	-	50,000,000	250,000,000	100,000,000	50,000,000	-	16,465,000	7,116,800	34,337,000	16,465,000	-	32.93	2.85	34.34	32.93	-	-
	Fasilitasi Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	-		250,000,000					-			-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Tanah Tambahan untuk Tugu Batas Kabupaten Tasikmalaya - Garut di Desa Kadipaten	-		300,000,000					190,871,200			-	-	63.62	-	-	-	-
	Pembebasan Lahan Jalan Menuju Kawasan Pusat Pemerintahan (Banprov 2013)	-		-					-			-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	-	<b>300,000,000</b>	<b>275,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>225,000,000</b>	-	<b>263,202,000</b>	<b>220,526,411</b>	<b>90,569,600</b>	<b>209,487,500</b>	-	<b>87.73</b>	<b>80.19</b>	<b>90.57</b>	<b>93.11</b>	-	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal	-	-	50,000,000		75,000,000	-	-	43,952,400		62,476,500	-	-	87.9	-	83.3	-	-
	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	-	300,000,000	150,000,000	100,000,000	150,000,000	-	263,202,000	133,942,011	90,569,600	147,011,000	-	87.73	89.29	90.57	98.01	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Kajian Studi Kelayakan Pendirian BPR Syariah	-	-	75,000,00					42,632,00	-		-	-	56.84	-	-	-	-
<b>24</b>	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan</b>	-	<b>300,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	-	<b>294,737,590</b>	<b>48,845,650</b>	<b>49,700,000</b>	<b>50,000,000</b>	-	<b>98.25</b>	<b>97.69</b>	<b>99.4</b>	<b>100</b>	-	-
	Monitoring Pelaksanaan Kredit Program	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	49,130,500	48,845,650	49,700,000	50,000,000	-	98.26	97.69	99.4	100	-	-
	Peningkatan Kapasitas Koperasi Pondok Pesantren	-	250,000,000				-	245,607,090				-	98.24	-	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	-	<b>175,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	-	<b>155,812,025</b>	<b>62,547,700</b>	<b>62,833,160</b>	<b>148,154,370</b>	-	<b>89.04</b>	<b>83.4</b>	<b>83.78</b>	<b>98.77</b>	-	-
	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCT)	-	175,000,000	75,000,000	75,000,000	150,000,000	-	155,812,025	62,547,700	62,833,160	148,154,370	-	89.04	83.4	83.78	98.77	-	-
<b>26</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	-	<b>10,000,000</b>	-	-	-	-	<b>10,000,000</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	-	-	-	-	-
	Penyusunan RENSTRA SKPD	-	10,000,000				-	10,000,000				-	100	-	-	-	-	-
<b>27</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	-	<b>200,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	-	<b>173,640,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>97,802,000</b>	-	<b>86.82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>97.8</b>	-	-
	Pembinaan, Pelatihan dan	-	200,000,000	150,000,000	50,000,000	100,000,000	-	173,640,000	150,000,000	50,000,000	97,802,000	-	86.82	100	100	97.8	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pemilihan Pemuda Pelopor																	
28	<b>Program Pencegahan NAPZA dan AIDS</b>	-	275,000,000	275,000,000	225,000,000	-	-	266,225,000	271,550,000	224,972,000	-	-	96.81	98.75	99.99	-	-	-
	Sosialisasi dan Penyuluhan HIV/AIDS	-	275,000,000				-	266,225,000				-	96.81	-	-	-	-	-
	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	-		275,000,000	125,000,000		-		271,550,000	124,978,000		-	-	98.75	99.98	-	-	-
	Workshop Pemberdayaan TP-UKS Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya	-			100,000,000		-			99,994,000		-	-	-	99.99	-	-	-
29	<b>Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial</b>	-	200,000,000	-	-	-	-	180,932,000	-	-	-	-	90.47	-	-	-	-	-
	Pembinaan SDM Pengelola Panti	-	200,000,000				-	180,932,000				-	90.47	-	-	-	-	-
30	<b>Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan</b>	-	3,321,000,000	3,587,400,000	1,575,000,000	1,500,000,000	-	2,678,347,640	3,530,640,350	1,553,719,250	1,481,955,750	-	80.65	98.42	98.65	98.8	-	-
	Pembuatan Sistem Informasi	-	350,000,000				-	-				-	-	-	-	-	-	-





No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Manajemen Sarana dan Prasarana Keagamaan																	
	Peningkatan Syiar Agama dan Kegiatan Keagamaan	-	2,771,000,000	2,787,400,000	1,150,000,000	1,500,000,000	-	2,678,347,640	2,744,372,250	1,137,285,250	1,481,955,750	-	96.66	98.46	98.89	98.8	-	-
	Pelatihan Revitalisasi Pendidikan Moral Melalui Peran Majelis Ta'lim	-	200,000,000				-	-				-	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Peningkatan Manajemen Bagi Lembaga Keagamaan	-		250,000,000			-	-	239,269,100			-	-	95.71	-	-	-	-
	Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Guru Madrasah Diniyah	-		200,000,000			-	-	199,330,850			-	-	99.67	-	-	-	-
	Penguatan Peran Majelis Ta'Lim Dalam Mendukung Program Pemerintah	-		350,000,000	125,000,000		-	-	347,668,150	118,250,000		-	-	99.33	94.6	-	-	-
	Pelatihan Peningkatan Peran Pontren Dalam Mendukung Bidang Kesos	-			100,000,000		-	-		99,992,000		-	-	-	99.99	-	-	-
	Kegiatan Sosialisasi Perbup No. 7 tentang Wajib	-			200,000,000		-	-		198,192,000		-	-	-	99.1	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Belajar Madrasah Diniyah																	
<b>31</b>	<b>Program Peningkatan Peran Pesantren Secara Optimal</b>	-	550,000,000	300,000,000	100,000,000	-	-	509,576,150	298,113,270	89,950,000	-	-	92.65	99.37	89.95	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Pos Kesehatan Pondok Pesantren	-	250,000,000				-	244,285,100				-	97.71	-	-	-	-	-
	Pelatihan Keterampilan Santri (di Pondok Pesantren Wilayah Tasik Utara)	-	300,000,000				-	265,291,050				-	88.43	-	-	-	-	-
	Pelatihan Cara Cepat Membaca Kitab Kuning (Metode Amsilati)	-	-	300,000,000	100,000,000		-	-	298,113,270	89,950,000		-	-	99.37	89.95	-	-	-
<b>32</b>	<b>Program Pemberian Dukungan Aktivitas Organisasi dan Kesehatan</b>	-	200,000,000	-	-	-	-	192,675,000	-	-	-	-	96.34	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pembangunan UKS	-	200,000,000				-	192,675,000				-	96.34	-	-	-	-	-
<b>33</b>	<b>Program Pendidikan Pemuda dan Organisasi</b>	-	3,475,000,000	2,400,000,000	-	800,000,000	-	2,072,911,540	2,368,366,150	-	796,432,050	-	59.65	98.68	-	99.55	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru Madrasah Diniyah	-	300,000,000				-	297,353,240				-	99.12	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pemberdayaan IMKASA	-	300,000,000				-	-				-	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Optimalisasi Fungsi Lembaga Keagamaan dalam Mensukseskan Program Gerbang Desa	-	350,000,000				-	-				-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas dan Mutu Pendidikan Keagamaan	-	325,000,000				-	300,140,000				-	92.35	-	-	-	-	-
	Pelatihan Keterampilan Manajerial bagi Remaja Mesjid	-	300,000,000				-	-				-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Database Organisasi Kepemudaan, Olahraga dan Peran Wanita di Kabupaten Tasikmalaya	-	325,000,000				-	246,310,000				-	75.79	-	-	-	-	-
	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	-	250,000,000	350,000,000			-	-	342,450,000			-	-	97.84	-	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pemerintah Bidang Keagamaan																	
	Pelatihan Kader Juru Dakwah (Forum Kiai Modal Tasik Utara)	-	275,000,000				-	248,318,000				-	90.3	-	-	-	-	-
	Penyuluhan dan Pelaksanaan Donor Darah	-	275,000,000				-	268,949,500				-	97.8	-	-	-	-	-
	Pembinaan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tasikmalaya	-	250,000,000				-	248,487,500				-	99.4	-	-	-	-	-
	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Bagi Kelompok Perempuan	-	325,000,000				-	271,650,800				-	83.58	-	-	-	-	-
	Gebyar Bulan Bahasa	-	200,000,000				-	191,702,500				-	95.85	-	-	-	-	-
	Pelatihan Manajemen Organisasi Wanita	-	-	150,000,000			-	-	140,780,650			-	-	93.85	-	-	-	-
	Seleksi dan Pembinaan Calon Peserta MTQ Tingkat Prov. Jabar	-	-	350,000,000			-	-	349,260,190			-	-	99.79	-	-	-	-
	Pelatihan Pemberdayaan Peran Remaja Masjid Dalam	-	-	300,000,000			-	-	299,698,860			-	-	99.9	-	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Memakmurkan Masjid																	
	Fasilitasi Pelatihan Penggerak Olahraga Pedesaan	-	-	425,000,000			-	-	424,411,200			-	-	99.86	-	-	-	-
	Penyuluhan Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial	-	-	250,000,000			-	-	245,550,000			-	-	98.22	-	-	-	-
	Penyuluhan Tentang Pentingnya Donor Darah	-	-	275,000,000			-	-	271,550,000			-	-	98.75	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelatihan Manajemen Organisasi Pemuda	-	-	300,000,000		200,000,000	-	-	294,665,250	199,380,500		-	-	98.22	-	99.69	-	-
	Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berpartisipasi dengan Lembaga	-	-			400,000,000	-	-		399,049,250		-	-	-	-	99.76	-	-
	Fasilitasi Pelatihan Penggerak Olahragawan Pedesaan	-	-			200,000,000	-	-		198,002,300		-	-	-	-	99	-	-
<b>3</b>	<b>Program</b>	-	<b>300,000,000</b>	<b>275,000,000</b>	<b>175,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	-	<b>269,140,500</b>	<b>272,600,000</b>	<b>175,000,000</b>	<b>199,200,000</b>	-	<b>89.71</b>	<b>99.13</b>	<b>100</b>	<b>99.6</b>	-	-
<b>4</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>																	



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pemilihan, Pelatihan, Pembinaan dan Penugasan Anggota Ghita Bahana Nusantara dan Ghita Bahana Praja	-	300,000,000				-	269,140,500				-	89.71	-	-	-	-	-
	Pemilihan, Pelatihan, Pembinaan dan Penugasan Anggota Ghita Bahana Nusantara	-	-	150,000,000	50,000,000	75,000,000	-	-	150,000,000	50,000,000	74,200,000	-	-	100	100	98.93	-	-
	Pemilihan, Pelatihan, Pembinaan dan Penugasan Anggota Ghita Bahana Praja	-	-	125,000,000	125,000,000	125,000,000	-	-	122,600,000	125,000,000	125,000,000	-	-	98.08	100	100	-	-
<b>35</b>	<b>Program Pelaksanaan Agenda Nasional/Daerah</b>	-	<b>1,550,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>	-	<b>1,538,146,050</b>	<b>1,995,592,500</b>	<b>1,072,649,000</b>	<b>1,365,557,700</b>	-	<b>99.24</b>	<b>99.78</b>	<b>97.51</b>	<b>91.04</b>	-	-
	Peringatan Hari Besar Nasional	-	1,550,000,000	2,000,000,000	1,100,000,000	1,500,000,000	-	1,538,146,050	1,995,592,500	1,072,649,000	1,365,557,700	-	99.24	99.78	97.51	91.04	-	-
<b>36</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	-	-	-	-	<b>40,452,500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-			40,452,500	-	-				-	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
<b>37</b>	<b>Program Kebijakan Penetapan Rupa Bumi</b>	-	-	-	-	<b>97,000,000</b>	-	-	-	-	<b>83,075,400</b>	-	-	-	-	<b>85.64</b>	-	-
	Verifikasi Data Rupa Bumi	-	-	-	-	97,000,000	-	-	-	-	83,075,400	-	-	-	-	85.64	-	-
<b>38</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Daerah</b>	-	-	-	-	<b>30,000,000</b>	-	-	-	-	<b>18,165,000</b>	-	-	-	-	<b>60.55</b>	-	-
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	18,165,000	-	-	-	-	60.55	-	-
<b>39</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	-	-	-	-	<b>50,000,000</b>	-	-	-	-	<b>34,317,500</b>	-	-	-	-	<b>68.64</b>	-	-
	Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	34,317,500	-	-	-	-	68.64	-	-
<b>40</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	-	-	-	-	<b>650,000,000</b>	-	-	-	-	<b>560,744,000</b>	-	-	-	-	<b>86.27</b>	-	-
	Persiapan Pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Agribisnis	-	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	343,185,000	-	-	-	-	85.8	-	-
	Pengembangan Investasi Lembaga Keuangan dan Non Keuangan	-	-	-	-	250,000,000	-	-	-	-	217,559,000	-	-	-	-	87.02	-	-
<b>41</b>	<b>Program Pengendalian Inflasi Daerah</b>	-	-	-	-	<b>250,000,000</b>	-	-	-	-	<b>220,309,400</b>	-	-	-	-	<b>88.12</b>	-	-



No	Uraian	Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	-	-			250,000,000	-	-			220,309,400	-	-	-	-	88.12	-	-
<b>42</b>	<b>Program Menginfestasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	-	-	-	-	<b>200,000,000</b>	-	-	-	-	<b>195,415,500</b>	-	-	-	-	<b>97.71</b>	-	-
	Sistem Pelayanan Pengaduan Terpadu	-	-			200,000,000	-	-			195,415,500	-	-	-	-	97.71	-	-
<b>43</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	-	-	<b>350,000,000</b>	-	-	-	-	<b>335,675,000</b>	-	-	-	-	<b>95.91</b>	-	-	-	-
	Pembinaan dan Penanganan Konflik di Daerah Rawan Aqidah	-	-	350,000,000		-	-	-	335,675,000		-	-	-	95.91	-	-	-	-
		<b>27,771,052,985</b>	<b>50,149,770,000</b>	<b>46,781,672,800</b>	<b>29,748,500,000</b>	<b>33,216,864,944</b>	<b>26,140,511,127</b>	<b>44,646,798,404</b>	<b>34,790,269,508</b>	<b>26,600,114,039</b>	<b>29,729,912,789</b>						<b>12.28</b>	<b>9.24</b>





## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, monitoring dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah pada bagian sebelumnya terus menunjukkan peningkatan, namun seiring dengan adanya peningkatan tugas yang menjadi kewenangan, maka tantangan ke depan juga akan semakin kompleks dan perlu diidentifikasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2021-2026 yang menjadi fokus perhatian antara lain:

Tabel 2.7 Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2021-2016

No.	Tantangan
1.	Penempatan SDM di masing-masing bagian belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi sehingga kebutuhan SDM yang berkompentensi tinggi sangat diperlukan untuk menghadapi permasalahan penyiap kebijakan pemerintah daerah yang semakin kompleks. Oleh karena itu perlu kiranya ditata kembali rekrutmen pegawai yang didasarkan kepada latar belakang disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan selain tetap dilakukan pembinaan pegawai melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan
2.	Pemahaman SDM akan tugas pokok dan fungsi masih kurang
3.	Kebijakan pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat berpengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah



No.	Tantangan
4.	Proporsi perencanaan dengan anggaran yang tersedia belum optimal yang berakibat ada beberapa program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan. Namun diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan memakai skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia
5.	Perkembangan teknologi informasi yang mendorong masyarakat menuntut pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel

Peluang merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi suatu organisasi untuk memanfaatkannya. Peluang tersebut tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan anggaran, akan tetapi dapat juga berupa respon masyarakat dan isu-isu yang sedang berkembang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, berbagai peluang yang ada dalam kurun waktu 2021-2026 yang menjadi fokus perhatian antara lain:

Tabel 2.8 Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2021-2026

No.	Peluang
1.	Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah
2.	Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak lain, baik melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faksimile;
3.	Adanya hak Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh kesempatan mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan sehingga akan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Sekretariat Daerah



No.	Peluang
4.	Adanya komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang berdasarkan potensi wilayah, sehingga memberikan dukungan yang kuat dalam pelaksanaan peran institusi dalam koordinasi pembangunan daerah
5.	Adanya jalinan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan organisasi lainnya yang makin memperkuat peran Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan daerah
6.	Adanya sarana dan prasarana yang memadai dan komitmen dari Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
7.	Tersedianya anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
8.	Adanya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi berdasarkan kinerja
9.	Adanya jejaring dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan swasta, menjadi peluang dalam hal ketersediaan sumber informasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan daerah



## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

*Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW Kabupaten Tasikmalaya dan KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah*

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah**

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan pemerintahan, maka harus diupayakan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi terutama untuk menghilangkan mata rantai pelayanan yang berbelit-belit dan menghapuskan ekonomi biaya tinggi serta upaya korporatisasi pelayanan publik untuk memberdayakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan melalui langkah menghilangkan campur tangan pemerintah yang terlalu besar di sektor-sektor publik. Oleh karena itu penyempurnaan bidang pelayanan publik masih perlu pembenahan yang sungguh-sungguh dalam berbagai sisi yang menjadi pendukung terhadap pelayanan umum yang baik.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal menyusun dan mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,



Staf Ahli Bupati dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Daerah, pemantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara. Adapun fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; (2) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, lembaga lain, dan Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Daerah; (3) penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat Daerah; dan (4) penyelenggaraan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah terkait dengan pencapaian indikator kinerja diantaranya adalah (1) belum optimalnya kualitas pelayanan publik (Tidak semua memiliki SOP, SP dan belum dilakukan survei IKM pada semua layanan publik); (2) penataan kelembagaan perangkat daerah belum optimal (masih ada PD yang belum dianalisis beban kerjanya, tupoksi yang masih tumpang tindih); (3) penataan ketatalaksanaan perangkat daerah belum optimal (ketidakjelasan hubungan kerja dan terbatasnya pedoman kerja yang disusun); (4) peraturan yang disusun belum



sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat (masih adanya produk hukum yang tumpang tindih);(5) belum terkelolanya data pembangunan dengan baik; (6) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum optimal;(7) belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam internal Sekretariat Daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diantaranya adalah (1) kurangnya tenaga analis kinerja dan analis jabatan;(2) kurangnya tenaga programmer; (3) kurangnya koordinasi antara Bagian dan PD; (4) kualitas SDM pada bagian masih belum sesuai dengan persyaratan jabatan (belum optimal); (5) pendistribusian sarana dan prasarana yang belum optimal. Faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pelayanan terkait tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu faktor internal dan eksternal. Rincian mengenai faktor-faktor tersebut ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2021-2026

No.	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1.	Jumlah dan kapasitas aparatur belum sepenuhnya memenuhi tuntutan tugas dan beban kerja	Koordinasi dengan PD dan kemampuan PD dalam memahami tupoksi
2.	Masih rendahnya pemahaman tupoksi aparatur pemerintah sehingga berakibat tidak maksimalnya hasil koordinasi	Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan
3.	Pola pembinaan aparatur belum berorientasi pada peningkatan kinerja	Masih adanya egosektoral pemerintah pusat yang berdampak pada pemerintah daerah



No.	Faktor Internal	Faktor Eksternal
4.	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien	Kebijakan pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat berpengaruh terhadap kinerja Sekretariat daerah

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah terkait dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan kapasitas SDM yang ada melalui pendidikan dan pelatihan;
- b) Optimalisasi koordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan Perangkat Daerah, maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi;
- c) Penyediaan hasil-hasil kajian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- d) Penyediaan data-data pembangunan daerah yang komprehensif untuk penyusunan perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- e) Penyusunan produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan;

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1 Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan RPJPD



Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap ke-3 yang diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Berpatokan pada arah pembangunan di atas, dengan mempertimbangkan isu strategis global, regional Jawa Barat, dinamika daerah sekitar dan berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah:

***“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”***

### **Gotong Royong**

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.





Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah ta'awun, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (Ta'awun) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

### **Religius/Islami**

Religius Islami berasal dari dua kata "Religius" dan "Islami". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata religion (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti obligation/bond (kewajiban), reverence (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya to bind (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan



dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, religius bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (السَّلم) **yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسَلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيم) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامَة) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (Rahmatan lil ‘alamin).**

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis



perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

### **Berdaya Saing**

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

### **Sejahtera**

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara

yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir , lahirnya suatu masyarakat yang



penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan dituangkan ke dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera	Gotong Royong	Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan.
	Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	Berdaya Saing	<p>Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.</p> <p>Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal social yang baik</p>



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.
	Sejahtera	Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

### 3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu



dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tabel 3.3 Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Religius/ Islami</i>	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berakhlak/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki





No	Pokok- Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		dan berakhlakul karimah	spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah</i> dan <i>fathonah</i> gunamenciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	<i>Berdaya Saing</i>	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.



No	Pokok- Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
3.	<i>Kesejahteraan</i>	Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2.3 Tujuan Dan Sasaran

Guna mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut.



Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh perangkat daerah (PD) di Kabupaten Tasikmalaya untuk periode tersebut.

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik berikut.



Tabel 3.4 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

**Visi: Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja				Kondisi Akhir 2026		
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
<b>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.</b>												
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	Poin	59.31	59.81	60.31	60.81	61.31	61.81	62.31	62.31
		S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	Poin	76.11	76.15	76.5	76.9	77.3	77.7	78.1	78.1
		S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	1.3 Persentase Penduduk Miskin	%	10.34	10.23	10.03	9.81	9.61	9.41	9.21	9.21
		S.4. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan local	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	NA	20.72	21.83	22.16	22.49	22.82	23.15	23.15



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja				Kondisi Akhir 2026		
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		S.5 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86.02	86.09	86.16	86.23	86.3	86.37	86.44	86.44
			I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505 (Pratama)	560 (Menuju Madya)	575 (Menuju Madya)	610 (Menuju Madya)	625 (Menuju Madya)	635 (Menuju Madya)	645 (Menuju Madya)	645 (Menuju Madya)
<b>Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.</b>												
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	S.6 Meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.7 Nilai LPPD	Skor	3.31 (Sedang)	3.34 (Sedang)	3.36 (Sedang)	3.38 (Sedang)	3.40 (Sedang)	3.42 (Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)
			I.8 Nilai SAKIP	Skor	B	62,37 (B)	65 (B)	67 (B)	69 (B)	71 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
			I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78.9 Baik	79 Baik	80 Baik	80 Baik	80.15 Baik	80.30 Baik	80.50 Baik	80.50 Baik
			I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	NA	76.14	77.90	78.20	79.70	79.85	80.60	80.60
			I.11 Indeks Profesionalitas ASN	Poin	56.73	57	58	59	60	61	62	62
			I.12 Indeks Inovasi Daerah	Skor	Kurang Inovatif	30 (Inovatif )	35 (Inovatif)	42 (Inovatif)	49 (Inovatif)	55 (Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)
<b>Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.</b>												



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja				Kondisi Akhir 2026		
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Rp Juta	21.33	23.41	24.84	26.27	27.71	29.14	30.57	30.57
<b>Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.</b>												
T.4 Meningkatkan investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	NA	3	3	4	4	5	5	5



Berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah pada Misi 1 yaitu meningkatkan kualitas sdm yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah. Pada misi 1, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam periode 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas sdm yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah. Selain pada Misi 1, misi lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tercantum dalam Misi 2 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional dimana tujuan dalam Misi 2 tersebut adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam Misi 2, terdapat sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hambatan yang dihadapi dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih, yaitu:



Tabel 3.5 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2021-2026

No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Penempatan SDM di masing-masing bagian belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi sehingga kebutuhan SDM yang berkompentensi tinggi sangat diperlukan untuk menghadapi permasalahan penyiap kebijakan pemerintah daerah yang semakin kompleks. Oleh karena itu perlu kiranya ditata kembali rekrutmen pegawai yang didasarkan kepada latar belakang disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan selain tetap dilakukan pembinaan pegawai melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan	Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
2.	Sekretariat Daerah sebagai koordinator PD dalam perumusan kebijakan belum mempunyai sertifikat ISO (termasuk SOP), dan ke depan diharapkan Sekretariat Daerah mampu menjadi lokomotif berlakunya ISO sebagai ukuran kualitas lembaga pemerintah daerah	Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah





No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3.	Pemahaman PD akan tugas pokok dan fungsi masih lemah	Adanya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2016 yang menjelaskan kembali rincian tugas dan fungsi sekretariat daerah
4.	Kebijakan pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat berpengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah	Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak lain, baik melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faksimile;
5.	Terlalu seringnya perubahan perundang-undangan yang tidak segera diikuti oleh pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda	Adanya hak Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh kesempatan mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan sehingga akan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Sekretariat Daerah
6.	Dinamika perkembangan yang mengakibatkan seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat cepat yang tentunya harus diimbangi dengan kesiapsiagaan khususnya dalam hal penyiapan bahan kebijakan bagi pimpinan yang berimplikasi terhadap kebutuhan masyarakat luas	Adanya komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang berdasarkan potensi wilayah, sehingga memberikan dukungan yang kuat dalam pelaksanaan peran institusi dalam koordinasi pembangunan daerah
7.	Proporsi perencanaan dengan anggaran yang tersedia belum optimal yang berakibat ada beberapa program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan. Namun	Adanya jalinan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan organisasi lainnya yang makin memperkuat peran Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan daerah



No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan memakai skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia	
8.	Perkembangan teknologi informasi yang mendorong masyarakat menuntut pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel	Adanya sarana dan prasarana yang memadai dan komitmen dari Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
9.	Belum optimalnya kinerja tim terpadu penanggulangan kemiskinan	Tersedianya anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
10.	Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Adanya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi berdasarkan kinerja
11.		Adanya jejaring dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan swasta, menjadi peluang dalam hal ketersediaan sumber informasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan daerah



### **3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, maka hal tersebut selain berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, juga mengacu Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, visi Kementerian Dalam Negeri adalah Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong. Kementerian PANRB melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan uraian sebagai berikut: (1) Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy; (2) Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global; (3) Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan



Akuntabel;(4)Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas (5) Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani;(6) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, selanjutnya ditetapkan tujuan Kementerian Dalam Negeri yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing;
- 2) Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel.

Dari tujuan yang ditetapkan tersebut, selanjutnya ditetapkan sasaran strategis beserta indikator utama Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	✓ Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional; ✓ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; ✓ Jumlah K/L/D yang Mencapai Predikat SPBE “Baik”.
		Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan	✓ Indeks Sistem Merit ✓ Indeks Profesionalitas ASN



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
		sejahtera	
		Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel	✓ Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional ✓ Persentase K/L/D yang memiliki nilai Implementasi SAKIP "B" ke Atas
		Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	✓ Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis
		Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	✓ Indeks Pelayanan Publik Nasional
		Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	✓ Persentase K/L/D yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Baik"
2.	Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel	Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien	✓ Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Kementerian PANRB; RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PANRB 2020-2024 98 RENSTRA KEMENTERIAN PANRB 2020-2024 98 ✓ Indeks Sistem



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
			Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB
		Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	✓ Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB ✓ Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB
		Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel	✓ Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB; ✓ Opini BPK
		Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima	✓ Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB

Sumber: Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi “*Jawa Barat Juara Lahir dan Bathin dengan Inovasi dan Kolaborasi*”. Dalam upaya mendukung pencapaian visi Provinsi Jawa Barat tersebut, maka telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan



Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 juga mengacu pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan setelah mengkaji Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka dalam bagian ini ditampilkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran yang menjadi pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tercantum dalam Misi 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rincian mengenai tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



Misi	Tujuan	Sasaran Renstra
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Tercapainya peningkatan keimanan dan kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya koordinasi pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan
	2. Meningkatkan Kualitas Penataan Daerah	Terpenuhinya persyaratan kelayakan pembentukan daerah persiapan otonom baru
	3. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial
		2. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial
		3. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Pembangunan
		4. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi
5. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran		

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Penterjemahan *money follow program* suatu perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik,





integratif, spasial (THIS). Dengan adanya pendekatan spasial sebagai salah satu prasyarat suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif, maka telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah harus dilakukan. Di Kabupaten Tasikmalaya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011–2031 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012. Dalam dokumen RTRW tersebut, telah ditentukan rencana struktur ruang, pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arah pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 3.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

No.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Uraian
1.	Rencana Struktur Ruang	<p>Sistem Pusat Pelayanan terdiri dari Sistem Perkotaan dan Sistem Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sistem Perkotaan terdiri dari (1) pusat kegiatan lokal (PKL) meliputi Perkotaan Singaparna dan Karangnunggal; (2) pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) meliputi Perkotaan Manonjaya dan Ciawi; dan (3) pusat pelayanan kawasan (PPK) meliputi Perkotaan Rajapolah, Taraju, Cipatujah, Cibalong, Mengunreja, Bantarkalong, Cikatomas, dan Cienam</li><li>➤ Sistem pedesaan di Kabupaten Tasikmalaya merupakan PPL yang meliputi Kecamatan Kadipaten, Pagerageung, Sukaresik, Jemanis, Sukahening, Sukaratu, Cisayong, Sariwangi, Luwisari, Cigalontang, Salawu, Tanjungjaya, Sukarame, Sukaraja, Padakembang, Puspahiang, Sodonghilir, Bojonggambir, Jatiwaras, Cikalong, Gunungtanjung, Salopa, Karangjaya, Bojongasih, Parungponteng, Culamega, dan Pancatengah</li></ul> <p>Rencana Sistem Jaringan Prasarana terdiri dari Sistem Prasarana Utama (sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, dan laut) dan Sistem Prasarana Lainnya</p>



No.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Uraian
		(sistem jaringan prasarana energi, sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya)
2.	Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>Rencana pola ruang wilayah daratan terdiri dari rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Rencana pola ruang kawasan lindung yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.</li><li>➤ Rencana pola ruang kawasan budidaya yang menjadi dasar rencana pengembangan kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan lainnya</li></ul>
3.	Penetapan Kawasan Strategis	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Penetapan kawasan strategis provinsi berupa kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan berada di Pulau Mauk Kecamatan Cikalong</li><li>➤ Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi KSK Perkotaan Singaparna, KSK Perkotaan Ciawi, KSK Perkotaan Manonjaya, KSK Perkotaan Karangnunggal, KSK Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah, KSK Wisata Pantai Karangtawulan, dan KSK Wisata Alam Gunung Galunggung</li><li>➤ Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi KSK Kampung Naga, KSK Wisata Ziarah Pamijahan, KSK Pesantren Suryalaya, KSK Pesantren Miftahul Huda, dan KSK Pesantren Cipasing</li><li>➤ Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi</li></ul>



No.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Uraian
		tinggi meliputi KSK Geothermal Karaha Boda di Kecamatan Kadipaten, KSK Batu Mulia Jasper di Kecamatan Pancatengah, KSK Plasma Nutfah Sirah Cimanjul di Kecamatan Cipatujah, KSK kawasan pertambangan di Kecamatan Cipatujah, Cikalong, dan Karangnunggal, dan KSK kawasan pesisir di Kecamatan Cipatujah dan Cikalong
4.	Arah Pemanfaatan Ruang	Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya berisi indikasi program penataan ruang yang terdiri atas perwujudan rencana struktur ruang, perwujudan pola ruang dan perwujudan kawasan strategis
5.	Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Sesungguhnya dalam dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, peran langsung dalam pelaksanaan kegiatan telah diamanatkan pada masing-masing Perangkat Daerah teknis. Mengingat Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten, maka peranan yang dapat diambil oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah melalui koordinasi dengan memastikan bahwa perangkat daerah yang terkait langsung sebagai pelaksana kegiatan telah melaksanakan



amanat RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 dengan seoptimal mungkin. Dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, maka diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap dokumen tersebut.

Tabel 3.9 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Sekretariat Daerah sebagai koordinator OPD dalam perumusan kebijakan belum mempunyai sertifikat ISO (termasuk SOP), dan ke depan diharapkan Sekretariat Daerah mampu menjadi lokomotif berlakunya ISO sebagai ukuran kualitas lembaga pemerintah daerah	Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
2.	Pemahaman OPD akan tugas pokok dan fungsi masih lemah	Adanya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2016 yang menjelaskan kembali rincian tugas dan fungsi sekretariat daerah
3.	Terlalu seringnya perubahan perundang-undangan yang tidak segera diikuti oleh pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda	Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak lain, baik melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faksimile;
4.	Dinamika perkembangan yang mengakibatkan seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat cepat yang tentunya harus diimbangi dengan	Adanya komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang berdasarkan potensi wilayah, sehingga memberikan dukungan yang kuat dalam pelaksanaan peran



No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	kesiapsiagaan khususnya dalam hal penyiapan bahan kebijakan bagi pimpinan yang berimplikasi terhadap kebutuhan masyarakat luas	institusi dalam koordinasi pembangunan daerah
5.	Perkembangan teknologi informasi yang mendorong masyarakat menuntut pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel	Adanya jalinan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan organisasi lainnya yang makin memperkuat peran Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan daerah
6.	Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Adanya sarana dan prasarana yang memadai dan komitmen dari Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
7.		Tersedianya anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
8.		Adanya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi berdasarkan kinerja
9.		Adanya jejaring dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan swasta, menjadi peluang dalam hal ketersediaan sumber informasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan daerah

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis



dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2021-2026, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan



permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM yang ada melalui pendidikan dan pelatihan;
- 2) Optimalisasi kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan Perangkat Daerah, maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi;
- 3) Penyediaan hasil-hasil kajian Produk Hukum yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- 4) Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik;
- 5) Penyusunan produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan;
- 6) Capaian kinerja makro dan capaian kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah belum optimal, hal tersebut berdasarkan perolehan nilai LPPD Tahun 2020 sebesar 3,30 dengan kategori “sedang” berdasarkan rumus terbaru (permendagri 18 tahun 2020);
- 7) Tingkat integrasi perencanaan terhadap capaian kinerja masih belum optimal, hal tersebut berdasarkan perolehan nilai SAKIP Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2020 berada pada 62,37 dengan kategori B;
- 8) Belum optimalnya tingkat pelayanan publik di Kabupaten Tasikmalaya, hal tersebut berdasarkan perolehan nilai IKM Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020 sebesar 78,9
- 9) Masih rendahnya minat baca masyarakat (Koleksi buku belum memenuhi standar perpustakaan nasional lokasi perpustakaan masih berada di Wilayah Kota Tasikmalaya,



belum optimalnya promosi publikasi, koleksi perpustakaan digital masih sedikit);

- 10) Masih rendahnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku;
- 11) Optimalisasi pelayanan penyelenggaraan fungsi penunjang administrasi pemerintahan.

Selain permasalahan internal terdapat juga isu Pembangunan Nasional mengenai Pengarus Utamaan Gender dimana Sekretariat Daerah ikut berkontribusi untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek, diantaranya melalui Guru Madrasah Diniyah pada subkegiatan Bina Mental Spiritual dan Ghita Bahana Praja pada subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.





## BAB IV TUJUANDAN SASARAN

*Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026*

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Sekretariat Daerah melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah adalah urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan. Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah tercantum pada misi kedua yaitu **mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional**, sesuai dengan misi kedua, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan Sekretariat Daerah yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam rangka pencapaian



indikator kinerja terkait program-program rutin yang dilaksanakan Sekretariat Daerah mengacu pada tujuan RPJMD tersebut. Adapun tujuan tersebut yang berkaitan secara langsung dengan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
  - ✓ Terpenuhinya Fasilitas Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah dengan indikator sasaran (a) Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan.
2. Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca, dengan sasaran:
  - ✓ Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat dengan indikator sasaran (a) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.
3. Meningkatnya Ketersediaan, Penyelamatan dan Perlindungan Arsip, dengan sasaran:
  - ✓ Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku dengan indikator sasaran (a) Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku.
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan sasaran:
  - ✓ Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan indikator sasaran (a) Persentase perizinan yang terfasilitasi.
5. Mengoptimalkan Penyusunan Kebijakan, Pengkoordinasian Administratif dan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah, dengan sasaran:



- ✓ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator sasaran (a) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
- ✓ Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator sasaran (a) Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti; (b) Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah; (c) Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah.
- ✓ Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator sasaran (a) Persentase Bahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti; (b) Level Kematangan/Maturitas PBJ.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target						Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk pembangunan daerah	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terpenuhinya Fasilitas Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	1	1	1	1	1	1
2	Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah pengunjung	350.000 Orang	375.000 Orang	380.000 Orang	390.000 Orang	400.000 Orang	410.000 Orang	Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	64,50	64,55	64,70	64,85	64,95	65,00
3	Meningkatnya Ketersediaan, Penyelamatan dan Perlindungan Arsip	Persentase Arsip yang terlindungi dan terselamatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	52,38	10,17% (6/59)	13,55% (8/59)	16,94% (10/59)	20,33% (12/59)	23,72% (14/59)
4	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Persentase jumlah lokasi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Persentase perizinan yang terfasilitasi	0%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Mengoptimalkan penyusunan kebijakan, pengkoordinasian administratif dan pelayanan administrasi perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi, Sarana dan Prasarana perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	CC	CC	B	B	B	B
									Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
									Persentase regulasi peraturan pusat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

## Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target						Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah						
									Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Bahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Level Kematangan/Maturitas PBJ		N/A	500%	600%	700%	800%	900%



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

*Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026*

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah melakukan upaya untuk mencapai visi, misi,



tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk pembangunan daerah	Terpenuhinya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah	Pemenuhan Kebutuhan Lahan untuk Peningkatan Pembangunan	Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Terkait		v	v	V	v	v
2	Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan Layanan Perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan, Penerapan Layanan Perpustakaan Berbasis TIK, Peningkatan pengelolaan Perpustakaan	v	v	v	V	v	v
3	Meningkatnya Ketersediaan, Penyelamatan dan Perlindungan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	Perbaikan Sistem Kearsipan Daerah Meliputi Pengelolaan Arsip Statis dan Arsip Dinamis	Peningkatan Pembinaan, pengelolaan, penggunaan TIK, perlindungan dan penyelamatan arsip	v	v	v	V	v	v
4	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Inventarisasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Tasikmalaya		v	v	V	v	v
5	Mengoptimalkan penyusunan kebijakan, pengkoordinasian administratif dan pelayanan administrasi perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Sinergitas antara Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Penyusunan perencanaan harus sesuai dengan target perangkat daerah	v	v	v	V	v	v
		Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Fasilitasi dan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan	Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya	v	v	v	V	v	v
			Mengoptimalkan Fasilitasi Kehidupan Beragama, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	v	v	v	V	v	v
			Menyediakan Regulasi/ Produk Hukum yang Mengakomodasi Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Nilai-nilai Lainnya yang Berkeadilan Guna Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyusunan Regulasi/Produk Hukum sesuai dengan kebutuhan	v	v	v	V	v	v
	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Peningkatan Fasilitasi dan Pelayanan dalam Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah/LK	v	v	v	V	v	v	





## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

*Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif*

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Secara teknis, penentuan program prioritas daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 didasarkan pada *interest* dan keinginan yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan pada saat pencalonan menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada yang lalu. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan



daerah. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan. Penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Beberapa program pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diantaranya adalah :

1. Program Pembinaan Perpustakaan
  - a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
    - 2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
    - 3) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
    - 4) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 5) Pengelolaan dan Pengembangan bahan Pustaka
  - b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat
    - 2) Pembangunan dan Pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat -tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota



- 3) Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial
  - 4) Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah  
Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Arsip
- Kegiatan Pengelolaan arsip Dinamis Daerah
- a. Kabupaten/Kota
    - 1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
    - 2) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
    - 3) Pengawasan Kearsipan Kewenangan Kab/Kota
  - b. Kegiatan Pengelolaan arsip statis daerah  
Kabupaten/Kota
    - 1) Pengumpulan dan Penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI
    - 2) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses arsip statis
  - c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi  
Kearsipan Nasional tingkat Kab/Kota
    - 1) Penyediaan Informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat Kab/Kota melalui JIKN
    - 2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
3. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
- a. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
    - 1) Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
    - 2) Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun



- b. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
- 1) Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
  - 2) Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
- Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- c.
- 1) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
  - 4) Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
- d. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
- 1) penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
  - 2) penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
- e. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
- 1) Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang



- 2) Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
  - 3) Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
  4. Program Perijinan Penggunaan Arsip
    - a. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
      - 1) Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
      - 2) Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
  5. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
    - a. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
      - 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno.
  6. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
    - a. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
      - 1) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - 2) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kabupaten/Kota
    - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPDKegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada
- c. Perangkat Daerah
  - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

f. Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Mebel
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

g. Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

h. Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Mebel
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional

- i. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - 3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - 4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat

- j. Daerah
  - 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
  - 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
  - 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi

- k. Pimpinan
  - 1) Fasilitasi Keprotokolan
  - 2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
  - 3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- l. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum





- 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- 2) Fasilitasi Bantuan Hukum  
Pendokumentasian Produk Hukum dan
- 3) Pengelolaan Informasi Hukum
- m. Kegiatan Penataan Organisasi
  - 1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  - 2) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
  - 3) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
  - 5) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
8. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
  - a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
    - 1) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
    - 2) Penataan Administrasi Pemerintahan
    - 3) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
    - 1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
    - 2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
    - 3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
  - c. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
    - 1) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
    - 2) Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
9. Program Perekonomian Dan Pembangunan
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
    - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD



- 2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- 3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
- 4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
- b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
  - 1) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program
  - 2) Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
  - 3) Pembangunan
- c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - 1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - 2) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
  - 3) Jasa
- d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
  - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
  - 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Tanah Kosong
  - a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
  - a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

# Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Strategi	Arah Kebijakan	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan								
						2021		2022		2023									2024		2025		2026		2021		2022			2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional																																					
	Mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk pembangunan daerah	Percentage masalah ganti kerugian dan sengketa tanah yang diselesaikan	Terpenuhi Fungsi Penyelidikan Masalah Pembinaan Tanah	Jumlah masalah ganti kerugian dan sengketa tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	Komis	1	1	1	1	1	1		Pembinaan Tanah untuk Pembangunan	Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Terkait	2.10.5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANKSI TUNANJANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Percentage penyelesaian Ganti Kerugian dan Sanksi Tunanjanah untuk Pembangunan	%			100	4.500.000.000	100	8.000.000.000	100	5.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000					
															2.10.5.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Sanksi Tunanjanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Sanksi Tunanjanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Lokasi			4.500.000.000		8.000.000.000		5.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000						
															2.10.5.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelidikan Masalah Ganti Kerugian dan Sanksi Tunanjanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelidikan Masalah Ganti Kerugian dan Sanksi Tunanjanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Dokumen	1	4.500.000.000	4	8.000.000.000	4	5.000.000.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000		3.000.000.000					
															2.10.8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KONONG	Percentage Pengelolaan Tanah Konong Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	%			100	100.000.000	100	211.100.000	100	232.210.000	100	255.431.000	100	280.974.100	100	309.071.510					
															2.10.8.201	Penyelesaian Masalah Tanah Konong	Jumlah Pengelolaan Tanah Konong Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Lokasi			100.000.000		211.100.000		232.210.000		255.431.000		280.974.100		309.071.510						
															2.10.8.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelidikan Tanah Konong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelidikan Tanah Konong	Laporan	1	100.000.000	1	211.100.000	1	232.210.000	1	255.431.000	1	280.974.100	1	309.071.510							
	Meningkatkan Pemanfaatan Kegiatan Masyarakat	Jumlah pengunjuk	Meningkatnya Minat Budyaswasta Masyarakat	Nilai Tingkat kegemaran masyarakat	Nilai	64,50	64,55	64,70	64,85	64,95	65,00		Pembinaan dan Pengembangan Layanan Perputakaan	Peningkatan sarana dan prasarana Perputakaan, Penerapan Layanan Perputakaan Berbasis TIK, Peningkatan pengabdian Perputakaan	2.23.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUTAKAAN	Percentage perputakaan yang dikelola dengan baik	%			100	1.602.500	100	3.646.000.000	100	2.530.000.000	100	1.600.000.000	100	1.035.000.000	100	1.165.000.000					
															2.23.2.2.01	Perputakaan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Percentage perputakaan tingkat daerah kabupaten/kota	%			100	1.602.500	100	2.980.000.000	100	2.060.000.000	100	1.155.000.000	100	540.000.000	100	570.000.000					
															2.23.2.2.01.01	Pengembangan dan Peningkatan Layanan Perputakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perputakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis SOLO2000 (ESM Information Technology Services Management)	Layanan			1	100.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000							
															2.23.2.2.01.02	Pengembangan Perputakaan di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah perputakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Perputakaan			1.602.500	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000						



# Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Strategi	Arah Kebijakan	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan						
						2021		2022		2023									2024		2025		2026		2021		2022		2023			2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
					%	52,38	10,17% (859)	13,55% (859)	16,94% (1089)	20,33% (1259)	23,72% (1429)				2.2.3.2.01.02	Pengembangan, Pengalihan dan Pengalihan Nasabah Kano yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Diterbitkan dan Didayagunakan	Jumlah Nasabah Kano yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Diterbitkan dan Didayagunakan	Besamplar					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000							
	Melekatnya kinerja pelayanan, Peningkatan dan Perbaikan Arsip	Persentase Arsip yang terfilingasi dan terkelompokkan	Melekatnya pengelolaan arsip secara baik	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baik	%	52,38	10,17% (859)	13,55% (859)	16,94% (1089)	20,33% (1259)	23,72% (1429)			2.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Arsip	%		100		100		100		100		100		100		100						
														2.2.4.2.01	Pengelolaan arsip Dinas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Arsip	%			100	650.000.000	100	660.000.000	100	470.000.000	100	525.000.000	100	550.000.000								
														2.2.4.2.01.01	Penggunaan dan Penggunaan Arsip Dinas	Jumlah Nasabah Dinas yang Diterbitkan dan Dikumakan	Bekas		5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	175.000.000	5	200.000.000									
														2.2.4.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinas	Jumlah Nasabah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunan	Bekas		20	400.000.000	20	400.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000									
														2.2.4.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinas Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		33		15		15		15		15		15								
														2.2.4.2.02	Pengelolaan arsip Dinas Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinas Kabupaten/Kota	%	100	855.000	100	510.000.000	100	409.000.000	100	300.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000								
														2.2.4.2.02.01	Pengumpulan dan Pengumpulan Arsip Dinas Kabupaten/Kota	Jumlah Salinan Otentik Nasabah Asli Arsip yang diserahkan kepada ANRI	Anip					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000								
														2.2.4.2.02.02	Abahasi, Pengolahan, Perawatan, dan Akses Arsip Dinas	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Abahasi, Pengolahan, Perawatan dan Akses Arsip Statis	Anip		5		5		3														
														2.2.4.2.03	Pengelolaan Sempul Jaringan Informasi Keanggotaan Nasional tingkat Kab/Kota	Persentase Pengelolaan Sempul Jaringan Informasi Keanggotaan Nasional tingkat Kab/Kota	%		100	40.000.000	100	150.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000									
														2.2.4.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Keanggotaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui IKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Keanggotaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui IKN	Pengguna		1		1					1											
														2.2.4.2.03.02	Pembentukan Kapasitas Unit Keanggotaan dan Lembaga Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembentukan Kapasitas Unit Keanggotaan dan Lembaga Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		1		1		1		1		1										
														2.2.4.3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%		100	100.000.000		100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000								
														2.2.4.3.01	Pemeliharaan Arsip Dilindungi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Revisi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip Dilindungi Daerah yang Memiliki Revisi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	%					100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000								
														2.2.4.3.01.01	Pemeliharaan, Penetapan dan Pelaksanaan Pemeliharaan Arsip yang Memiliki Revisi	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemeliharaan, Penetapan dan Pelaksanaan Pemeliharaan Arsip yang Memiliki Revisi	Anip					2		2		2		2									



# Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Strategi	Arah Kebijakan	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan						
						2021		2022		2023									2024		2025		2026		2021		2022		2023			2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1						2021	2022	2023	2024	2025	2026							2021	2022	2023	2024	2025	2026														
2.34.3.2.05																																					
2.34.3.2.05.1																																					
2.34.3.2.05.2																																					
2.34.3.2.05.3																																					
2.34.4.																																					
2.34.4.2.01.																																					
2.34.4.2.01.1																																					
2.34.4.2.01.2																																					
3.29.5																																					
3.29.5.2.01																																					
3.29.5.2.01.1																																					
3.29.5.2.01.2																																					
4.1.1																																					
4.1.1.2.01																																					
4.1.1.2.01.01																																					





# Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Target						Strategi	Arah Kebijakan	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	CAPLAIN TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan						
						2021		2022		2023									2024		2025		2026		2021		2022		2023			2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4.1.1.2.06.05																Paket		12	371.377.800	12	598.000.000	12	657.800.000	12	723.580.000	12	795.938.000	12	875.531.800								
4.1.1.2.06.06																Dokumen		12	127.408.000	12	236.150.000	12	259.765.000	12	285.741.500	12	314.315.600	12	345.747.215								
4.1.1.2.06.08																Laporan		0	2.775.000	0	15.000.000	0	16.500.000	0	17.000.000	0	18.000.000	0	19.000.000								
4.1.1.2.06.09																Laporan		12	1.218.936.000	12	1.200.000.000	12	1.320.000.000	12	1.452.000.000	12	1.597.200.000	12	1.756.920.000								
4.1.1.2.07																%		100	7.195.862.790	100	3.423.973.150	100	3.766.370.465	100	4.183.007.512	100	4.557.308.263	100	5.053.039.089								
4.1.1.2.07.01																Unit		1	1.500.000.000	1	800.000.000	1	880.000.000	1	968.000.000	1	1.064.800.000	1	1.171.280.000								
4.1.1.2.07.02																Unit			1.821.100.000		1.243.635.650		1.367.999.215		1.504.799.137		1.655.279.050		1.820.806.955								
4.1.1.2.07.05																Unit		124	626.370.000	136	298.000.000	150	327.800.000	150	360.580.000	160	396.638.000	150	436.301.800								
4.1.1.2.07.06																Unit			-		-		-	4	40.000.000		-		-								
4.1.1.2.07.10																Unit		23	1.941.229.600		573.703.150		631.073.465		694.180.812		763.598.893		839.958.782								
4.1.1.2.07.11																Unit		131	1.406.763.190	52	508.634.350	55	559.497.785	60	615.447.564	65	676.992.320	65	744.691.552								
4.1.1.2.08																%		100	2.265.912.300	100	2.961.720.000	100	3.257.892.000	100	3.583.681.200	100	3.942.049.320	100	4.336.254.252								
4.1.1.2.08.02																Laporan		12	1.514.262.300	12	1.677.550.000	12	1.845.305.000	12	2.029.835.500	12	2.232.819.050	12	2.456.100.955								
4.1.1.2.08.04																Laporan		12	751.650.000	12	1.284.170.000	12	1.412.587.000	12	1.553.845.700	12	1.709.230.270	12	1.880.153.297								
4.1.1.2.09																%		100	4.353.401.700	100	4.781.043.355	100	5.266.647.891	100	5.789.812.460	100	6.365.293.706	100	6.999.323.076								
4.1.1.2.09.01																Unit		6		6		6		6		6	6	6									
4.1.1.2.09.02																Unit		165		165		167		167		167	167	167									

# Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sumbu	Target						Strategi	Arah Kebijakan	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	CAPLAIN TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan						
						2021		2022		2023									2024		2025		2026		2021		2022		2023			2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
																		20	100.000.000	25	100.000.000	30	110.000.000	35	121.000.000	40	133.100.000	40	146.410.000								
																		6	4.604.000	6	25.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	36.000.000								
																		12	620.000.000	12	1.192.274.400	20	1.311.501.840	35	1.442.652.024	40	1.586.917.226	40	1.745.608.949								
																		318	700.000.000	318	550.000.000	318	605.000.000	318	665.500.000	300	732.050.000	300	805.255.000								
																		100	3.881.075.248	100	4.412.446.928	100	4.853.691.621	100	5.339.060.783	100	5.872.966.861	100	6.460.263.547								
																		28	2.158.575.248	28	2.147.446.928	28	2.362.191.621	28	2.598.410.783	28	2.858.251.861	28	3.144.077.047								
																		5	200.000.000	6	165.000.000	6	181.500.000	6	199.650.000	6	219.615.000	6	241.576.500								
																		4	922.500.000	4	1.500.000.000	4	1.650.000.000	4	1.815.000.000	4	1.996.500.000	4	2.196.150.000								
																		24	600.000.000	24	600.000.000	24	660.000.000	24	726.000.000	24	798.600.000	24	878.460.000								
																		100	6.162.900.000	100	6.514.974.000	100	7.166.471.400	100	7.883.118.540	100	8.671.430.394	100	9.538.573.433								
																		12	1.117.580.000	12	1.050.500.000	12	1.155.550.000	12	1.271.105.000	12	1.398.215.500	12	1.538.037.050								
																		12	417.200.000	12	721.600.000	12	793.760.000	12	873.136.000	12	960.449.600	12	1.056.494.560								
																		12	4.228.120.000	12	4.742.874.000	12	5.217.161.400	12	5.738.877.540	12	6.312.765.294	12	6.944.041.823								
																		100	8.613.203.800	100	6.500.000.000	100	7.150.000.000	100	7.865.000.000	100	8.651.500.000	100	9.516.650.000								
																		12	2.000.000.000	12	1.800.000.000	12	1.980.000.000	12	2.178.000.000	12	2.395.800.000	12	2.635.380.000								
																		12	6.163.203.800	12	4.200.000.000	12	4.620.000.000	12	5.082.000.000	12	5.590.200.000	12	6.149.220.000								
																		12	450.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	732.050.000								
																		100	1.155.000.000	100	1.750.000.000	100	1.940.000.000	100	2.151.250.000	100	2.386.212.500	100	2.647.646.875								

## Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Strategi	Arah Kebijakan	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan						
						2021		2022		2023									2024		2025		2026		2021		2022		2023			2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						

# Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target						Strategi	Arah Kebijakan	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subsektor	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	CAPLAIN TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan								
						2021		2022		2023									2024		2025		2026		2021		2022			2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						100%	100%	100%	100%	100%	100%			4.1.2.02.01	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kelembagaan Masyarakat	Dokumen			8	65.000.000	8	100.000.000	8	110.000.000	8	121.000.000	8	133.100.000	8	146.410.000							
					%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Memperbaiki Regulasi/Prosedur Hukum yang Mengakibatkan Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Nilai-nilai Lainnya yang Berkaitan Sama Menengah Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyusunan Regulasi/Prosedur Hukum sesuai dengan kebutuhan	4.1.2.2.03	Evaluasi dan Koordinasi Hukum	%	100	915.000.000	100	1.250.000.000	100	1.625.000.000	100	2.017.500.000	100	2.491.250.000	100	2.990.375.000									
												4.1.2.2.03.01	Evaluasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	340	225.000.000	350	250.000.000	360	275.000.000	370	302.500.000	380	332.500.000	390	366.025.000											
												4.1.2.2.03.02	Evaluasi Bantuan Hukum	Kasus	24	350.000.000	26	500.000.000	28	800.000.000	30	1.130.000.000	32	1.493.000.000	34	1.892.500.000											
												4.1.2.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelompokan Informasi Hukum	Dokumen	340	340.000.000	350	500.000.000	360	550.000.000	370	605.000.000	380	665.500.000	390	732.050.000											
					%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan dalam Bidang Perencanaan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	Peningkatan Koordinasi dan Peningkatan Prangkat Daerah dan Perumahan Daerah/LK	4.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	%	100	4.035.000.000	100	5.102.877.300	100	6.076.142.330	100	7.497.633.863	100	9.061.274.549	100	10.781.279.304									
												4.1.3.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan	%	100	1.450.000.000	100	1.539.000.000	100	1.542.000.000	100	1.896.200.000	100	2.285.820.000	100	2.714.402.000											
												4.1.3.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelompokan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	350.000.000	4	480.000.000	4	528.000.000	4	580.800.000	4	638.880.000	4	702.768.000											
												4.1.3.2.01.02	Pengendalian dan Diseminasi Perencanaan	Laporan	4	650.000.000	4	450.000.000	4	695.000.000	4	964.500.000	4	1.260.950.000	4	1.587.045.000											
												4.1.3.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4	150.000.000	4	290.000.000	4	319.000.000	4	350.900.000	4	385.990.000	4	424.589.000											
												4.1.3.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan BUMD	Dokumen	4	300.000.000	4	319.000.000	4	-	4	-	4	-	4	-											
												4.1.3.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	%	100	360.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	1.331.000.000	100	1.464.100.000	100	1.610.510.000											
												4.1.3.2.02.01	Evaluasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	2	660.000.000	2	550.000.000	2	605.000.000	2	665.500.000	2	732.050.000	2	805.255.000											
												4.1.3.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4	100.000.000	4	300.000.000	4	330.000.000	4	363.000.000	4	399.300.000	4	439.230.000											





## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

*Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026*

Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkatan capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sementara itu, target adalah batas atau besaran yang ditetapkan untuk dicapai.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Dengan adanya penetapan indikator beserta targetnya, Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dapat bekerja secara efektif, efisien, dan optimal sehingga target yang dibebankan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dapat tercapai. Selanjutnya indikator kinerja Sekretariat Daerah yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel



7.1, sedang definisi operasional dari masing-masing indikator ditampilkan pada Tabel 7.2





Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Kasus	N/A	1	1	1	1	1	1
2	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	64,50	64,50	64,55	64,70	64,85	64,95	65,00
3	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	52,38%	52,38%	10,17% (6/59)	13,55% (8/59)	16,94% (10/59)	20,33% (12/59)	23,72% (14/59)
4	Persentase perizinan yang terfasilitasi	%	N/A	0%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah		N/A	CC	CC	B	B	B	B
6	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Persentase Bahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Level Kematangan/Maturitas PBJ	Level	N/A	N/A	5	6	7	8	9



## BAB VIII PENUTUP

*Bagian ini menjelaskan arti penting dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai arah peningkatan pelayanan dan penilaian kinerja dalam periode 2021-2026*

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah dokumen perangkat daerah untuk perencanaan periode 5 tahun yang menjadi panduan bagi pimpinan dan seluruh unit kerja Sekretariat Daerah dalam menentukan langkah kerja yang akan dilakukan sehingga konsisten dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dalam hal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagai wujud perencanaan, tanggung jawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan didukung sumber daya manusia yang profesional dan handal, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



berupaya mewujudkan mekanisme perencanaan yang akuntabel, transparan, dan konsisten berlandaskan komitmen yang telah dibangun dan disepakati.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yaitu: **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera”**.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 akan menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja. Karena itu, dokumen ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sekretariat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam pelayanannya terkait perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya

Dr. H. MOHAMAD ZEN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680608 199412 1 003

